

Interaksi Masyarakat Perbatasan

Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu

KAAN
981

Direktorat
Budayaan

16

Rois Leonard Arios
Yondri



BPSNT Padang Press

302.4816

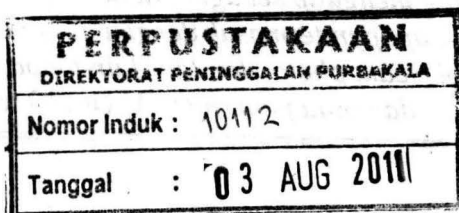
RO1

i

~~305.895981~~
A 21
i

Interaksi Masyarakat Perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu

Interaksi Masyarakat Perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu



Rois Leonard Arios
Yondri




BPSNT Padang Press
2009

Rois Leonard Arios dan Yondri
*Interaksi Masyarakat Perbatasan Provinsi Sumatera Selatan
dan Provinsi Bengkulu*
©2009 BPSNT Padang Press
Cetakan Pertama: Juli 2009

Hak Penerbitan Pada BPSNT Padang
*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan
cara apapun termasuk dengan cara penggunaan mesin
fotokopi, scan, photo, dan lain-lain tanpa izin sah dari penulis
dan atau penerbit (UU No. 19 tahun 2002)*

Editor:

Prof. Dr. Nursyirwan Effendi

Desain Cover:

Rois Leonard Arios

Lay-out isi:

CV. Faura Abadi

Percetakan:

CV. Faura Abadi

ISBN:

978-602-8742-00-9

Penerbit:

BPSNT Padang Press (Anggota IKAPI Sumatera Barat)

Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji Padang

Sumatra Barat

Telp/faksmile: 0751-496181

www.bpsnt-padang.info

e-mail: surat@bpsnt-padang.info

Bermimpilah seperti jika anda akan hidup selamanya. jalani hidup seperti jika anda akan mati hari ini (Dream as if you'll live forever. live as if you'll die today)

~ James Dean

PENGANTAR PENULIS

Daerah perbatasan merupakan daerah yang memiliki potensi positif dan negatif. Tidak sedikit daerah perbatasan yang tertinggal dari aspek pembangunan fisik, jauh dari berbagai fasilitas, dan tidak jarang menjadi sumber konflik antarmasyarakat di kedua perbatasan tersebut.

Kota Lubuklinggau sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah administratif yang baru berdiri namun memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan daerahnya. Berbagai fasilitas sudah terdapat di daerah perbatasan ini seperti perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan keadaan di perbatasan wilayah Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Memasuki wilayah Bengkulu seakan memasuki wilayah pedalaman karena di perbatasan tidak terdapat rumah penduduk dan fasilitas penerangan sehingga menimbulkan kesan daerah tertinggal. Kondisi fisik daerah ini secara sosial budaya ternyata tidak terdapat perbedaan karena antara penduduk di kedua daerah perbatasan ini berasal dari suku bangsa yang sama yaitu suku bangsa Lembak atau yang oleh penduduk setempat disebut Orang Dusun. Dari kenyataan ini, masyarakat di perbatasan tidak pernah mengalami konflik sosial, budaya, maupun berbagai kasus lainnya. Faktor budaya menjadi alat pemersatu diantara mereka sehingga batas administratif tidak menjadi batasan bagi mereka untuk berinteraksi.

Tulisan dalam buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2006 dengan judul penelitian “Dinamika

Sosial Ekonomi Masyarakat Perbatasan Provinsi Sumatra Selatan – Provinsi Bengkulu” sehingga pembaca akan menemukan beberapa perbedaan dengan kondisi saat ini di Kota Lubuklinggau. Namun dalam beberapa bagian ada data yang telah perbaharui sesuai data tahun 2008.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini yang dimulai dari persiapan, pengumpulan data di lapangan, analisa, dan penulisan. Secara khusus terima kasih penulis sampaikan kepada para informan yang berada di Lubuklinggau maupun yang ada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Akhir kata, saya menyadari tulisan ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi keakuratan data maupun dalam penyajian. Untuk itu penulis mohon kritik dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini.

Padang, Juli 2009

Penulis

SAMBUTAN SETDITJEN NBSF DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Diiringi puji dan syukur, saya menyambut gembira atas terbitnya buku tentang *Interaksi Masyarakat Perbatasan Provinsi Sumatera Selatan-Provinsi Bengkulu*. Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh staf fungsional Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang. Menurut penulis buku, daerah perbatasan memiliki potensi positif dan negatif. Tidak sedikit daerah perbatasan secara administratif yang tertinggal dari pembangunan fisik, jauh dari berbagai fasilitas, dan tidak jarang menjadi sumber konflik antarmasyarakat di kedua perbatasan tersebut.

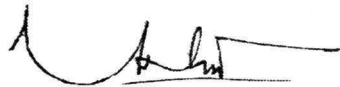
Terutama Kota Lubuklinggau, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu, merupakan salah satu daerah administratif yang baru berdiri, namun memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Berbagai fasilitas sudah terdapat di daerah perbatasan ini, seperti fasilitas perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan keadaan di perbatasan wilayah Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Lebih lanjut, dipaparkan juga oleh penulis buku bahwa memasuki wilayah Bengkulu seakan memasuki wilayah pedalaman, karena di perbatasan tidak terdapat rumah penduduk dan fasilitas penerangan, sehingga menimbulkan kesan daerah tertinggal. Kondisi fisik daerah ini secara sosial budaya ternyata tidak terdapat perbedaan karena antara penduduk di kedua daerah perbatasan ini berasal dari suku bangsa yang sama yaitu suku bangsa Lembak atau yang oleh

penduduk setempat disebut *orang dusun*. Dari kenyataan ini, masyarakat di perbatasan tidak pernah mengalami konflik sosial, budaya, maupun berbagai kasus lainnya. Faktor budaya menjadi alat pemersatu di antara mereka, sehingga batas administratif tidak menjadi batasan dalam berinteraksi.

Mudah mudahan terbitnya buku ini dapat menambah pengetahuan, wawasan pemikiran pembaca dalam memahami bermacam macam budaya yang ada di tengah masyarakat, khususnya masyarakat di perbatasan Propinsi Sumatra Selatan dan Propinsi Bengkulu.

Jakarta, Juli 2009
Setditjen NBSF Depbudpar



Drs. Mumus Muslim, MM.
NIP.19630502 198403 1 001

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Luas Kecamatan dan Jumlah Kelurahan
Di Kota Lubuklinggau.....20
2. Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2004.....27
3. Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2004.....28
4. Tabel 4. Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau
Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2003.29
5. Tabel 5. Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau
Berdasarkan Agama Tahun31

DAFTAR FOTO DAN GAMBAR

1. Gambar 1. Peta Provinsi Sumatera Selatan.....23
2. Gambar 2. Peta Kota Lubuklinggau.....24
3. Gambar 3. Perbatasan Kota Lubuklinggau dengan
Kabupaten Rejang Lebong.....30
4. Gambar 4. Gapura Selamat Jalan dari Bengkulu.....30
5. Gambar 5. Tugu Logo Sumatera Selatan di Perbatasan.41
6. Gambar 6. Terminal Watas.....42
7. Gambar 7. Terminal Kalimantan.....42
8. Gambar 8. Pemukiman Penduduk Bengkulu di
Perbatasan.....43
9. Gambar 9. Kantor Walikota Lubuklinggau.....43
10. Gambar 10. Kota Lubuklinggau malam hari.....44
11. Gambar 11. Peta Sumatera Selatan Pada Masa
Pemerintahan Belanda.....58
12. Gambar 12. Penampilan Kesenian Minangkabau 58
13. Gambar 13. Salah seorang informan.....59
14. Gambar 14. Stasiun Kereta Api di Terminal Kalimantan.59
15. Gambar 15. Aktivitas bongkar muat di terminal Watas....60
16. Gambar 16. Salah satu bentuk rumah tradisional Rawas..60
17. Gambar 17. Salah satu pemukiman suku bangsa Rawas...61

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis.....	iii
Sambutan SETDITJEN NBSF.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Foto.....	viii
Daftar Isi.....	vix
Bab I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Maksud dan Tujuan.....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Output.....	13
G. Outcome.....	13
H. Metodologi Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	17
Bab II. Deskripsi Daerah Perbatasan	
A. Kondisi geografis.....	18
B. Sejarah Kota Lubuklinggau.....	25
C. Kondisi Demografis.....	26
D. Kondisi Sosial Budaya.....	32
E. Sarana.....	36
Bab III Dinamika dan Bentuk Interaksi Sosial	
A. Mobilitas Penduduk.....	45
B. Penguasaan Sumber Produksi dan Interaksi Bidang Ekonomi.....	48
C. Interaksi Bidang Budaya.....	50
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	50
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki batas-batas laut dengan 10 negara yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, Palau, PNG, Australia, dan Timor Lorosae, serta batas wilayah darat, berbatasan dengan 3 negara yaitu Malaysia, PNG, dan Timor Lorosae memiliki pulau sebanyak 17.508, panjang pantai 80.791 km, luas wilayah termasuk ZEE 7,7 juta km, dan lautan 5,8 juta km¹. Potensi ini sangat rawan sehingga perlu keseriusan pemerintah dalam menanganinya. Beberapa kasus masa lalu seperti lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, dan konflik kepemilikan Pulau Ambalat dengan Malaysia menunjukkan lemahnya posisi tawar Indonesia dalam politik internasional. Kasus serupa yang masih hangat sekarang ini adalah penguasaan Pulau Bidadari dan beberapa pulau lainnya di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh pengusaha Inggris untuk kepentingan bisnis dan melarang penduduk setempat untuk mendekati pulau tersebut. Wilayah Indonesia yang sedemikian rupa seringkali wilayah perbatasan ataupun pulau-pulau terluar Indonesia kurang mendapat perhatian. Depkominfo dalam situsnya² menyebutkan bila pemerintah tidak memperhatikan pembangunan daerah perbatasan tersebut maka jangan heran bila pada suatu saat, wilayah perbatasan akan ditinggalkan oleh masyarakatnya karena mereka eksodus ke kota-kota sehingga daerah

¹ <http://buletinlitbang.dephan.go.id>

² www.depkominfo.go.id

perbatasan menjadi kosong penduduk akibat tidak ada kehidupan di perbatasan tersebut.

Dalam berbagai tulisan, permasalahan wilayah perbatasan umumnya lebih ditekankan pada perbatasan negara, padahal tidak sedikit masalah yang muncul pada masyarakat perbatasan di tingkat yang lebih kecil seperti antarprovinsi, antarkabupaten/ kota, dan daerah yang lebih kecil lainnya. Beberapa tulisan tentang masyarakat perbatasan negara antara lain adalah yang membahas Timor Lorosae. Suara Pembaruan³ menulis “Masalah yang kerap timbul sejak terbentuknya Negara Timor Leste, khususnya di sepanjang desa-desa yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste adalah adanya migrasi baik dari penduduk negara Timor Leste ke Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam tulisan lain juga disebutkan bahwa persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antarwarga desa yang terdapat di kedua sisi perbatasan. Hal ini dapat menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional, dapat berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks. Di samping itu, keberadaan pengungsi Timor Leste yang masih berada di wilayah Indonesia dalam jumlah yang cukup besar potensial menjadi permasalahan perbatasan di kemudian hari⁴ Demikian juga halnya perbatasan antara Kabupaten Kaerom Provinsi Papua dengan negara PNG terdapat masalah yang serius terutama karena latar belakang budaya sehingga dikhawatirkan akan terjadi klaim terhadap hak-hak tradisional mereka. Sedangkan tentang perbatasan Malaysia dengan Kalimantan, tulisan cukup banyak dipublikasikan berkenaan dengan dinamika sosial ekonomi yang terjadi di

³ “Persoalan Perbatasan RI-Timor Leste Kian Pelik”. Harian Suara Pembaruan, edisi 2 Maret 2006.

⁴ Nukila Evanty, “Regulasi tentang Batas Wilayah NKRI” (www.Suarapembaruan.com/news/2004/08/13)

daerah perbatasan tersebut. Beberapa tulisan tentang hal tersebut antara lain oleh Riwanto Tirtosudarno (2001), Robert Siburian (2001), John Haba (2001), Poline Bala (2001), dan Ja'achmah, dkk. (1978). Sedangkan tulisan-tulisan yang mengkaji perbatasan antarprovinsi dan budaya antara lain adalah Rois Leonard Arios, dkk (2003), Maryetti, dkk (1999), Djurip, dkk (2000), Gusti Asnan (2001), Renggo Astuti dan Sigit W (1999), dan I Made Purna (2001).

Kajian wilayah perbatasan secara administratif pemerintahan maupun secara budaya menjadi sangat menarik terutama dengan munculnya beberapa kasus konflik di beberapa wilayah perbatasan. Beberapa kasus seperti konflik perbatasan pada wilayah yang lebih kecil adalah seperti yang terjadi pada konflik perbatasan Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat dengan keluarnya PP No. 84 tahun 1999 tentang perluasan Kota Bukittinggi yang ditolak oleh masyarakat Kabupaten Agam⁵. Kasus-kasus ini hanya beberapa contoh sederhana yang terjadi di Indonesia, namun bila tidak ditangani secara serius akan memberikan dampak yang cukup besar bagi bangsa Indonesia seperti lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia.

Dari beberapa kasus yang diuraikan di atas, wilayah perbatasan termasuk juga wilayah paling pinggir Indonesia merupakan daerah yang rentan terjadinya konflik intern warga setempat maupun ekstern. Beberapa kasus yang mungkin terjadi dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal seperti kasus tapal batas administratif (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga negara), kasus interaksi negatif antarmasyarakat di kedua daerah yang berbatasan, pembangunan ekonomi yang

⁵ "PP 84 Timbulkan Perpecahan", *Harian Singgalang*, edisi 27 Februari 2006.

tidak seimbang antara satu daerah dengan daerah lain, keteringgalan secara infrastruktur di daerah dibandingkan dengan pusat pemerintahan, dan pemilikan dan pengelolaan areal di daerah perbatasan. Sedangkan Eddy M.T. Sianturi dan Nafsiah dalam tulisannya menyebutkan terdapat 4 permasalahan di daerah perbatasan dan inilah yang membuat daerah perbatasan selalu tertinggal. Keempat masalah tersebut adalah:⁶

1. Lokasinya yang relatif terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah;
2. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat;
3. Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal);
4. Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di daerah perbatasan (*blank spot*).

Secara konseptual masyarakat perbatasan adalah masyarakat yang berada di daerah perbatasan. Mengikuti konsep terminologi daerah perbatasan, masyarakat perbatasan ini secara langsung terpengaruh dengan adanya daerah perbatasan. Oleh karena itu masyarakat perbatasan tidak saja terdiri dari masyarakat lokal, tetapi juga mereka yang sekedar mencari nafkah di daerah perbatasan.⁷

⁶ Eddy MT. Sianturi, dan Nafsiah, "Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI" (<http://buletinlitbang.dephan.go.id>)

⁷ Robert Siburian. "Entikong: Daerah Tanpa Krisis Ekonomi di Perbatasan Kalimantan Barat - Serawak". *Makalah* Pada Simposium Jurnal Antropologi Indonesia, Padang 18 - 21 Juli 2001. Hal. 7.

Konsep masyarakat perbatasan secara spesifik dapat dikelompokkan pada dua konsep, yaitu:

1. Masyarakat yang berada di daerah perbatasan secara administratif pemerintahan seperti perbatasan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara. Masyarakat yang berada di daerah perbatasan ini dipisahkan oleh batas-batas administratif, namun secara budaya belum tentu berbeda (masyarakatnya dari latar belakang budaya yang sama). Salah satu contoh daerah perbatasan dengan budaya yang sama adalah perbatasan Kabupaten Kaerom (Papua) dengan Papua New Guenia. Secara administratif masyarakat ini berada di dua negara yang berbeda tetapi memiliki budaya yang sama. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar-penduduk yang terdapat di kedua sisi perbatasan, menyebabkan *klaim* terhadap hak-hak tradisional dapat berkembang menjadi masalah kompleks dikemudian hari.⁸
2. Masyarakat perbatasan yaitu masyarakat pendukung suatu kebudayaan yang berada di perbatasan wilayah kebudayaan suku bangsa lain. Wilayah kebudayaan tidak dapat dipisahkan oleh batas-batas administratif pemerintahan karena suatu wilayah kebudayaan ditentukan oleh luas cakupan/ penguasaan budaya suatu suku bangsa. Contoh wilayah kebudayaan suku bangsa Minangkabau yang meliputi beberapa wilayah seperti wilayah Provinsi Sumatera Barat, sebagian Provinsi Riau hingga Negeri Sembilan Malaysia. Masyarakat yang berada di daerah perbatasan ini memungkinkan berlangsungnya proses asimilasi,

⁸ Nukila Evanty, *Loc.cit*

akulturasi, ataupun amalgamasi sebagai akibat dari interaksi secara terus menerus antarkedua budaya yang berbeda seperti yang terjadi di Kecamatan Rao Kabupaten Pasasaman yang merupakan wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Sumatera Barat⁹

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan memiliki batas administratif sebelah barat dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Posisi Kota Lubuklinggau sangat strategis karena merupakan daerah jalur lintas Sumatera dan berada di tengah-tengah. Kondisi ini memungkinkan daerah ini sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang dan lalu lintas angkutan dari dan ke Bengkulu.¹⁰ Sebagai kota perdagangan, tidak mengherankan bila Kota Lubuklinggau dihuni oleh penduduk dari berbagai latar belakang suku bangsa sehingga bahasa yang digunakan sehari-hari juga menjadi beragam. Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam situsnya¹¹ menulis bahwa di Kota Lubuk Linggau selain bahasa Indonesia, bahasa daerah yang dipergunakan masyarakat adalah Bahasa Adat Musi, Bahasa Adat Rawas, Bahasa Adat Saling, Bahasa Adat Rejang, dan Bahasa Adat Campuran. Demikian juga berbagai perkumpulan suku bangsa juga cukup beraneka ragam di daerah ini.

Suku bangsa Rejang dan suku bangsa Lembak – terutama yang berada di daerah perbatasan – sebagai suku bangsa yang mendiami Kabupaten Rejang Lebong dan

⁹ Rois Leonard Arios, dkk. 2003. *Identitas Masyarakat Perbatasan: Kasus di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman*. Padang: BKSNT Padang.

¹⁰ Satu satu kota yang dapat disamakan dengan daerah ini adalah Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat.

¹¹ <http://www.lubuklinggau.go.id>

berbatasan langsung dengan Kota Lubuk Linggau, dengan melihat kondisi perekonomian dan sarana yang ada, ada kecenderungan untuk lebih berafiliasi ke daerah Kota Lubuk Linggau. Hal ini sangat memungkinkan dengan melihat pesatnya pembangunan di Kota Lubuk Linggau sedangkan bila kita menuju arah barat dan tiba di wilayah Kabupaten Rejang Lebong akan terlihat suasana yang sangat berbeda. Fasilitas umum yang masih terbatas dan cenderung masih tertinggal padahal jaraknya hanya sekitar 5 km dari kantor walikota Lubuk Linggau.

Dengan melihat kondisi ini tentu menjadi sangat menarik membandingkan dua wilayah administratif yang secara fisik cenderung jauh tertinggal (terisolir) di wilayah Provinsi Bengkulu, sedangkan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan relatif sangat maju. Tentu ada hal-hal yang memungkinkan untuk dipelajari sehingga diketahui proses sebuah kota berkembang dengan berbagai dampak positif dan negatifnya.

B. Perumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, permasalahan penelitian difokuskan pada tiga hal utama, yaitu:

1. bagaimana sejarah perkembangan Kota Lubuk Linggau?
2. bagaimana interaksi budaya dan sosial masyarakat di kedua sisi perbatasan?
3. bagaimana peran penduduk di kedua sisi perbatasan dalam bidang ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi serta interaksi yang terjadi pada masyarakat di kedua sisi perbatasan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kondisi fisik daerah Lubuk Linggau yang relatif lebih maju dibandingkan dengan wilayah Rejang Lebong yang relatif lebih tertinggal. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan positif sebagai alternatif dalam penanganan masyarakat di wilayah perbatasan sehingga dapat sejajar dengan daerah lain yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup operasional yaitu lokasi penelitian, dan ruang lingkup materi yaitu materi penelitian yang akan dikaji.

✓ **Lingkup operasional**

Lingkup operasional penelitian meliputi daerah-daerah yang berbatasan langsung antara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan. Secara administratif yang lebih kecil daerah ini berada di Kecamatan Lubuk Linggau Barat dan Kecamatan Padang Ulak Tanding dan Kecamatan Kota Padang Provinsi Bengkulu. Namun sebagai daerah yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi, maka lokasi penelitian dipusatkan di Kecamatan Lubuk Linggau Barat dan sebisa mungkin juga mengadakan pengamatan di Desa Pakuhaji Kecamatan Padang Ulak Tanding.

✓ Lingkup Materi Penelitian

Untuk dapat menjawab permasalahan penelitian, maka lingkup materi penelitian ini terdiri dari:

- ↳ sejarah pemerintahan Kota Lubuk Linggau;
- ↳ struktur masyarakat berdasarkan suku bangsa;
- ↳ konsep penduduk asli dan pendatang;
- ↳ pemilikan lahan di perbatasan;
- ↳ penguasaan ekonomi di wilayah perbatasan;
- ↳ bentuk interaksi sosial (*cooperation, competition, conflict*) pada masyarakat di kedua sisi perbatasan
- ↳ arena interaksi dan simbol-simbol yang dipergunakan

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer¹², dinamika didefinisikan sebagai studi tentang gerak beserta hal-hal yang menyebabkan terjadinya gerak tersebut; Dinamika kelompok didefinisikan sebagai perubahan dalam kehidupan segolongan masyarakat yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan; Dinamika Pembangunan adalah perubahan-perubahan yang dilakukan untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik dalam mengisi pembangunan; sedangkan dinamika sosial adalah perubahan yang dilakukan

¹² Peter Salim dan Yenny Salilm. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press. Hal. 355.

oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut.

Dalam perkembangan masyarakat di wilayah perbatasan dewasa ini, dimana sistem perdagangan telah menjadi kekuatan besar, berbagai fasilitas transportasi telah memungkinkan terjadinya mobilitas sedemikian intensif. Setiap orang dalam dunia yang serba cepat seakan-akan bergerak terus menerus meninggalkan batas-batas wilayah kebudayaan. Arjun Appadurai¹³ mengatakan bahwa mobilitas merupakan fenomena sosial, ekonomi, dan politik “terpenting” di abad ke-20. Kecendrungan ini memperlihatkan bahwa batas-batas kebudayaan mulai mengabur karena orang/kelompok orang memiliki kemampuan bergerak begitu cepat ke tempat yang berbeda dan kemudian menjadi bagian dari suatu tempat tertentu dengan *setting* kultural yang berbeda. Dalam situasi ini terjadi proses “reproduksi sosial”, teritorial dan kebudayaan terhadap identitas kelompok yang sedang berubah akibat proses migrasi dalam berbagai skala.

Salah satu ekologi kehidupan ekonomi masyarakat adalah dengan adanya sistem pasar. Appadurai¹⁴ mengatakan bahwa pasar telah memperluas orientasi masyarakat dalam mobilitas sehingga batas-batas sosial budaya selain meluas juga mengabur akibat berubahnya orientasi ruang dalam masyarakat. Hal ini menurut Parsudi Suparlan¹⁵ terutama karena pasar dan tempat-tempat umum dapat dilihat sebagai

¹³ dalam Irwan Abdullah, “Globalisasi, Gaya Hidup Kota, dan Relokasi Kebudayaan”, Makalah pada Simposium Internasional Journal Antropologi ke-2, Universitas Andalas Padang 18 – 21 Juli 2001, hal. 4

¹⁴ *Ibid.* hal. 4

¹⁵ Parsudi Suparlan. “Keyakinan Keagamaan dalam Konflik Antarsuku bangsa”. Makalah pada Simposium Internasional Journal Antropologi ke-2, Universitas Andalas Padang 18 – 21 Juli 2001

pranata dengan norma-norma dan nilai-nilai budaya yang dilandasi oleh prinsip tawar-menawar secara terbuka dan suka rela diantara para pelaku yang saling berkepentingan.

Karakteristik pembeda etnis seperti yang diajukan oleh Levine dan Campbell tersebut, mengingat perkembangan dewasa ini, perlu kiranya diperhatikan dengan seksama karena akan ditemui beberapa unsur pembeda tersebut yang sama, mirip, atau memang berbeda sama sekali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:¹⁶

1. Mengaburnya batas-batas geografis yang disebabkan oleh mobilitas penduduk tidak hanya dalam rangka aktivitas yang cenderung terjadi melintasi batas-batas geografis, tetapi juga karena keterikatan orang terhadap fisik (geografis) semakin melemah. Dalam hal ini loyalitas terhadap daerah asal mulai runtuh karena orang akan dengan mudah mengubah tempat tinggal untuk mencari kemungkinan-kemungkinan baru yang jauh lebih baik. Dalam konteks semacam ini sistem penerangan yang dibangun dengan asumsi batas-batas geografis menjadi kurang relevan. Kelompok sasaran tidak dapat didefenisikan dari lokalitas tempat tinggal akibat tingkat mobilitas yang begitu tinggi dan loyalitas tempat yang begitu lemah;
2. Batas kebudayaan mulai menghilang, suatu proses yang berlangsung akibat faktor mobilitas dan akibat proses sosialisasi budaya yang berubah. Mobilitas yang padat menyebabkan landasan budaya seseorang menjadi sangat berbeda dengan sebelumnya sehingga "budaya asal" mulai tidak dikenal dengan baik yang

¹⁶ Irwan Abdullah, *op.cit.* hal. 4 – 8

kemudian proses sosialisasi yang berlangsung pada landasan kultural yang lain menyebabkan luasnya pengetahuan budaya dan hilangnya loyalitas tradisional. Simbol yang digunakan mulai berubah sehingga dibutuhkan simbol-simbol baru yang lebih komunikatif dalam penyampaian pesan yang dapat bersifat lintas etnik, kelompok, agama, dan lain-lain;

3. otonomi individu dan kelompok yang semakin besar dalam mendapatkan pengesahan sosial politik. Hubungan-hubungan kekuasaan mulai berubah, khususnya dalam siklus hubungan *society, state, dan market*. Individu atau kelompok mulai memiliki hubungan yang lebih seimbang dengan negara sehingga fungsi kontrol masyarakat lebih dapat berfungsi, demikian pula dengan pasar dimana hak-hak konsumen lebih dapat dinegosiasikan.

Hubungan antarindividu maupun kelompok di daerah perbatasan telah menghasilkan interaksi sosial sebagai dampak dari terjadinya kontak sosial dan komunikasi.¹⁷ Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.¹⁸ Ada dua kemungkinan yang terjadi dalam interaksi yaitu saling mempertahankan etnisitasnya atau saling memberi dan menerima unsur-unsur budaya daerah tempat/arena interaksi berlangsung. Bila asumsi pertama terjadi, kondisi ini akan

¹⁷ Kontak Sosial dan Komunikasi adalah syarat terjadinya interaksi sosial. Baca Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 71.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 67.

memungkinkan terjadinya konflik antar-suku bangsa, sedangkan bila asumsi kedua yang terjadi kemungkinan besar akan melahirkan sebuah variasi budaya baru atau bahkan menciptakan etnis baru sebagai gabungan dari unsur-unsur budaya yang berinteraksi.

F. Output (Keluaran)

Penelitian ini menghasilkan sebuah laporan penelitian yang mengkaji interaksi masyarakat di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu.

G. Outcome (Hasil yang diharapkan)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak baik pribadi, lembaga, swasta, maupun pemerintah dalam mengambil kebijakan. Tulisan ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi tentang kajian etnisitas terutama dalam kajian hubungan antar budaya sehingga keserasian antar suku bangsa dapat terjalin.

H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

1. Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan memfokuskan pada masyarakat yang tinggal di perbatasan Sumatera Selatan dan

Bengkulu. Secara administratif pemerintahan perbatasan ini berada di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuk Linggau Barat Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai data pembanding dilakukan juga pengumpulan data di wilayah Provinsi Bengkulu Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Kayu Ara. Lokasi ini sangat tepat karena kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sangat jauh berbeda di kedua daerah tersebut demikian juga dari segi budaya terdapat perbedaan latar belakang etnis.

2. Pemilihan informan

Penelitian ini menekankan pada aspek sosial ekonomi masyarakat di daerah perbatasan. Dengan demikian data yang diharapkan adalah data riil di lokasi tersebut dengan berbagai argumen yang logis dan sistematis. Untuk memperoleh data tersebut diperlukan informan yang dapat memberikan informasi yang diharapkan. Kriteria informan yang diperkirakan layak dan dapat dipercaya adalah orang yang sudah mendiami daerah tersebut lebih dari 10 tahun, pendukung kebudayaan utama atau kebudayaan pendatang di lokasi penelitian, memiliki wawasan tentang adat istiadat setempat, dan memiliki wawasan tentang dinamika sosial politik setempat. Di samping itu informasi pembanding diperoleh dari informan yang dipilih secara acak (*purposive sampling*). Informan tambahan ini dapat diperoleh dari masyarakat yang berada persis di perbatasan provinsi dan para petugas jembatan uji petik Dinas Perhubungan Kota Lubuk Linggau yang berada di perbatasan. Jumlah informan utama dan informan tambahan sifatnya fleksibel dan tergantung pada kecukupan data.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengkajian tentang wilayah perbatasan provinsi tidak kalah pentingnya dengan kajian penelitian perbatasan antarnegara, sehingga diperlukan sumber-sumber data yang sah terutama data sejarah. Untuk mengumpulkan data yang diharapkan dilakukan beberapa kegiatan yaitu:

- a. *Studi kepustakaan*, yaitu mengumpulkan artikel, buku, ataupun tulisan-tulisan yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan penelitian yang dilakukan. Studi kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Daerah Curup, Perpustakaan Universitas Bengkulu, Perpustakaan Wilayah Provinsi Bengkulu, Perpustakaan Universitas Sriwijaya di Indralaya, arsip dan dokumen penting lainnya milik Pemerintah Kota Lubuk Linggau maupun data yang terdapat di kedua kecamatan perbatasan tersebut;
- b. *Wawancara*. Wawancara dilakukan secara terfokus untuk mendapatkan data utama. Selama wawancara dapat digunakan alat bantu pengumpul data berupa pedoman wawancara (*interview guide*) yang hanya diperlukan untuk mengarahkan data yang ingin diperoleh, dan alat perekam (*audio* dan atau *visual*) yang dipergunakan bila diperlukan dan tidak mempengaruhi suasana wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan utama yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Wawancara terfokus dilakukan terhadap informan terpilih untuk menggali sejarah hidup (*life history*) informan sebagai bahan analisa dengan membandingkan dengan data lainnya. Sejarah hidup yang dimaksudkan disini lebih difokuskan pada pengalaman-pengalaman dan

opini informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan wawancara sambil lalu dilakukan dengan informan tambahan yang dipilih secara proporsional. Hasil wawancara ini dianalisa dan dibandingkan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk memperoleh kelogisan data.

- c. *Pengamatan.* Pengamatan sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi lingkungan sosial, lingkungan alam, dan pola interaksi di beberapa arena seperti pasar, rumah, serta arena interaksi lainnya. Pengamatan juga menjadi penting untuk membandingkan antara data wawancara dengan fakta di lapangan. Salah satu lokasi yang sangat penting dilakukan pengamatan adalah daerah di kedua sisi perbatasan untuk melihat lingkungan fisik dan lingkungan sosial masyarakatnya.

4. Analisa Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁹ Analisa dilakukan dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikan data yang diperoleh dari lapangan berupa catatan pengamatan lapangan, catatan wawancara, rekaman wawancara, foto-foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

¹⁹ Lexy J. Moleong. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 103.

I. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Masalah Penelitian
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Ruang Lingkup Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Output
- G. Outcome
- H. Metodologi Penelitian
- I. Sistematika Penulisan

Bab II Deskripsi Daerah Perbatasan

- A. Kondisi geografis
- B. Sejarah Kota Lubuk Linggau
- C. Kondisi Demografis
- D. Kondisi Sosial Budaya
- E. Sarana

Bab III Dinamika dan Bentuk Interaksi Sosial

- A. Mobilitas Penduduk
- B. Penguasaan Sumber Produksi
- C. Interaksi Bidang Ekonomi
- D. Interaksi Bidang Budaya

Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

GAMBARAN DAERAH PERBATASAN

A. Kondisi Geografis

Kota Lubuklinggau adalah salah satu Kota setingkat Kabupaten paling Barat wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak pada posisi antara 102 derajat 40'0"-103 derajat 0'0" bujur Timur(BT) dan 3 derajat 4'10"-3 derajat 22'30" Lintang Selatan(LS) berbatasan langsung dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang secara administratif mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan BKL (Batu Kuning Lakitan) Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo dan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan Provinsi Bengkulu
- Sebelah Barat Berbatasan dengan provinsi Bengkulu

Kota Lubuklinggau terletak pada daerah tropis basah dengan ketinggian 129 meter di atas permukaan laut dan curah hujan rata-rata 2000 s.d. 2500 mm pertahun dimana setiap tahunnya jarang sekali diketemukan bulan-bulan kering. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan yang terendah terjadi pada bulan Juni setiap tahunnya.

Wilayah pusat Kota Lubuklinggau merupakan daerah dataran yang rata. Sekitar 66,5 % wilayahnya dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75 % tanah liat dan keadaan alamnya terdiri dari hutan potensial, sawah, kebun karet,

ladang, dan kebun lainnya. Namun berbeda ketika meninggalkan pusat kota memasuki wilayah luar kota akan ditemukan daerah yang bergelombang terutama daerah-daerah memasuki wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Jenis tanah di Kota Lubuklinggau terdiri dari 4 jenis tanah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis tanaman. Keempat jenis tanah tersebut adalah:

1. jenis aluvial berwarna coklat kekuning-kuningan. Jenis ini dapat dijumpai di bagian dataran Kota Lubuklinggau dan sesuai untuk tanaman padi sawah dan palawija;
2. jenis asosiasi gleihumus. Jenis tanah ini cocok untuk tanaman padi dan terdapat 7,17 % dari luas kota serta sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan;
3. jenis litosol. Jenis tanah ini sangat cocok untuk tanaman keras, rumput-rumputan, dan ternak;
4. jenis regosol. Jenis tanah ini cocok untuk tanaman padi, palawija, dan tanaman keras lainnya. Sebagian besar jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan.

Tidak sulit untuk tiba di Kota Lubuklinggau, letaknya yang berada persis di daerah lintas Sumatera menjadikan daerah ini sebagai daerah transit bagi angkutan barang maupun penumpang dari Jakarta menuju Medan (atau Banda Aceh) maupun sebaliknya atau menuju Bengkulu.

Bila dirinci per kecamatan, maka pada tahun 2004 Kota Lubuklinggau memiliki 8 kecamatan dan 72 kelurahan seperti yang tertera pada tabel berikut.

**Tabel 1. Luas Kecamatan dan Jumlah Kelurahan
Di Kota Lubuklinggau**

Kecamatan	Luas Daerah km ²	Jumlah Kelurahan
1. Lubuklinggau Barat I	54,8087	11
2. Lubuklinggau Barat II	10,8363	8
3. Lubuklinggau Selatan I	85,1518	7
4. Lubuklinggau Selatan II	37,1658	9
5. Lubuklinggau Timur I	13,9041	8
6. Lubuklinggau Timur II	10,1240	9
7. Lubuklinggau Utara I	152,4039	10
8. Lubuklinggau Utara II	37,1054	10
Jumlah Tahun 2004	401,50	72
2003	401,50	49
2002	401,50	49
2001	401,50	40

Sumber: diolah dari *Kota Lubuklinggau Dalam Angka 2004*

Sesuai Perda No. 18 Tahun 2004 tentang pembentukan kecamatan dan Perda No. 17 Tahun 2004 tentang kelurahan maka Kota Lubuklinggau terdiri dari Kecamatan Lubuklinggau Barat I (11 kelurahan) Kecamatan Lubuklinggau Barat II (8 kelurahan) Kecamatan Lubuklinggau Timur I (8 kelurahan) Kecamatan Lubuklinggau Timur II (9 kelurahan) Kecamatan Lubuklinggau Utara I (10 kelurahan) Kecamatan Lubuklinggau Utara II (10 kelurahan) Kecamatan Lubuklinggau Selatan I (7 kelurahan) dan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II (9 kelurahan).

Luas wilayah Kota Lubuklinggau 401,50 Km² atau 40,150 Ha dengan rincian per wilayah Kecamatan sebagai berikut:²⁰

- Lubuklinggau Timur I dan II 31,31 km² / 3,131 Ha
- Lubuklinggau Barat I dan II 99,48 km² / 9,948 Ha
- Lubuklinggau Utara I dan II 131,02 Km² / 13,02 Ha
- Lubuklinggau Selatan I dan II 139,69 Km² / 13,96 Ha

Luas wilayah kecamatan tersebut merupakan luas 2 buah kecamatan yang dimekarkan dari satu kecamatan. Sehingga contoh Kecamatan Lubuklinggau Timur I dan II maksudnya adalah Kecamatan Lubuklinggau Timur I dan Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Dengan demikian jumlah kecamatan di Kota Lubuklinggau adalah sebanyak 8 kecamatan.

Satu-satunya gunung yang terdapat di wilayah Kota Lubuklinggau adalah Bukit Sulap. Bukit Sulap cukup terkenal bagi masyarakat di Lubuklinggau dan dianggap memiliki keramat. Sebutan Bukit Sulap menurut penduduk setempat adalah karena bukit ini dianggap pintar bermain sulap. Bila dilihat dari kejauhan akan tampak dekat, tetapi bila dilihat dari jarak yang dekat akan terasa tampak jauh. Dengan keunikan ini, maka Pemerintah Kota Lubuklinggau menjadikan Bukit Sulap sebagai bagian dari logo Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Pusat pemerintahan Kota Lubuklinggau berada tidak jauh (\pm 1 km) dari batas Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Bengkulu. Jarak antara Ibukota Lubuklinggau dengan

²⁰ Berdasarkan data pada <http://www.lubuklinggau.go.id>

Ibu Kota Kecamatan dan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:²¹

- Lubuklinggau – Palembang : 388 Km
- Lubuklinggau – Lubuklinggau Barat I : 5 Km
- Lubuklinggau – Lubuklinggau Barat II : 2 Km
- Lubuklinggau – Lubuklinggau Timur I : 7 Km
- Lubuklinggau – Lubuklinggau Timur II : 3 Km
- Lubuklinggau – Lubuklinggau Utara I : 11 Km
- Lubuklinggau – Lubuklinggau Utara II : 3 Km
- Lubuklinggau – Lubuklinggau Selatan I : 10 Km
- Lubuklinggau – Lubuklinggau Selatan II : 8 Km

B. Sejarah Kota Lubuklinggau

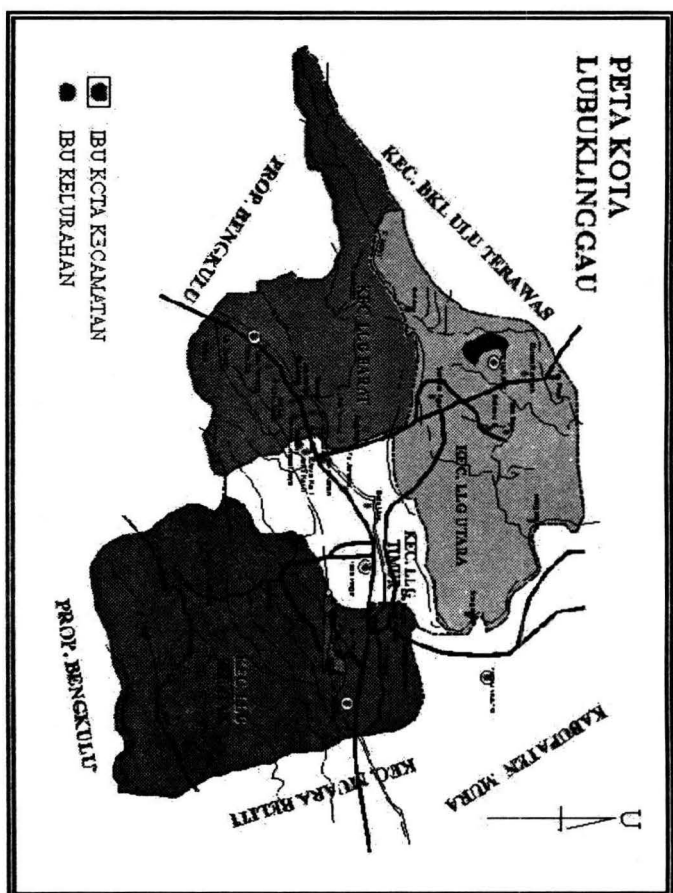
Kota Lubuklinggau merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. Namun walaupun sudah berdiri sendiri, ibukota Kabupaten Musi Rawas masih tetap berada di Lubuklinggau. Dengan demikian berbicara mengenai sejarah Kota Lubuklinggau tidak terlepas dari sejarah Kabupaten Musi Rawas.

Nama Kabupaten Musi Rawas berasal perpaduan dua buah sungai yang mengalir di bagian barat Provinsi Sumatera Selatan yaitu hulu Sungai Musi dan aliran Sungai Rawas. Tanggal 20 April 1943, pemerintah Jepang menggabungkan dua daerah yang berbeda bahasa dan adat yaitu *onderafdeeling* Musi Ulu dan *onderafdeeling* Rawas menjadi Kabupaten Musi Rawas.

- Tahun 1929 status Kota Lubuklinggau adalah sebagai Ibu Kota Marga Sindang Kelingi Ilir, di bawah *Onderdistrict* Musi Ulu. Sedangkan *Onderdistrict* Musi ulu beribukota Muara Beliti. Tahun 1933 ibukota



Gambar 1. Peta Propinsi Sumatera Selatan



Gambar 2. Peta Kota Lubuk Linggau

Tahun 1942-1945 Lubuklinggau menjadi ibukota Kewedanaan Musi ulu dan dilanjutkan setelah kemerdekaan. Pada waktu Clash I tahun 1947, Lubuklinggau dijadikan ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Bagian Selatan.

Tahun 1948 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kabupaten Musi Ulu Rawas dan tetap sebagai Ibukota Keresidenan Palembang. Pada Tahun 1956 Lubuklinggau menjadi Ibukota Daerah Swatantra Tingkat II Musi Rawas.

Tahun 1981 dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tanggal 30 Oktober 1981 Lubuklinggau ditetapkan statusnya sebagai Kota Administratif. Tahun 2001 dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 Tanggal 21 Juni 2001 Lubuklinggau statusnya ditingkatkan menjadi Kota dengan 8 kecamatan yaitu: Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, dan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lubuklinggau, wilayah administrasi Kota Lubuklinggau meliputi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuklinggau Barat, Lubuklinggau Timur, Lubuklinggau Utara dan Lubuklinggau Selatan. Empat kecamatan tersebut membawahi 40 kelurahan. Pada tahun 2002, dilakukan pemekaran kelurahan, sehingga jumlah kelurahan menjadi 49 kelurahan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2005 telah ditetapkan Perda Lubuklinggau No. 180 dan Perda Lubuklinggau No. 181 Tahun 2004 tentang pemekaran kecamatan dan kelurahan. Dimana jumlah kecamatan dari 4 menjadi 8 kecamatan dan jumlah kelurahan dari 49 menjadi 72 kelurahan.²²

C. Kondisi Demografi

Sangat sulit untuk menentukan jumlah penduduk Kota Lubuklinggau secara pasti. Pada siang hari, Kota Lubuklinggau akan terasa sangat padat termasuk lalu lalang berbagai jenis kendaraan. Sedangkan pada malam hari terasa sangat lengang. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh posisi Lubuklinggau sebagai kota transit dan kota perdagangan. Penduduk dari berbagai daerah datang ke pusat kota untuk berdagang pada pagi hari dan pada sore hari kembali ke rumah mereka masing-masing. Migrasi ini (nglaju) telah menambah jumlah penduduk Kota Lubuklinggau pada siang hari. Namun berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh BPS Kota Lubuklinggau, jumlah penduduk Kota Lubuklinggau pada tahun 2004 adalah sebesar 171.235 jiwa seperti yang tertera pada tabel 2.

Jumlah penduduk Kota Lubuklinggau tahun 2008 sebanyak 183.580 jiwa atau bertambah sekitar 16 persen dari angka jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2000. Rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1,89 persen. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah 92.901 orang laki-laki dan 90.679 orang perempuan, yang berarti seks rasio sebesar 102,45.

²² Diunduh dari <http://lubuklinggau.go.id/detailsly.php?recordID=7>

Struktur umur penduduk Kota Lubuklinggau tergolong penduduk “muda” karena proporsi penduduk di bawah 15 tahun masih cukup tinggi, yaitu hampir 30 persen dan penduduk tua (umur diatas 60 tahun) tidak mencapai 5 persen.

Distribusi penduduk menurut kecamatan tidak merata. Dari delapan kecamatan yang ada di Kota Lubuklinggau, Kecamatan Lubuklinggau Timur II memiliki jumlah penduduk paling banyak (17,40 persen), kemudian diikuti oleh Kecamatan Lubuklinggau Barat I (15,36 persen), dan Kecamatan Lubuklinggau Utara II (14,86 persen). Sedangkan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit (7,17 persen).

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau Berdasarkan Kecamatan Tahun 2004

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rata-Rata/km ²
1. Lubuklinggau Barat I	26.604	485
2. Lubuklinggau Barat II	18.922	1.746
3. Lubuklinggau Selatan I	11.916	140
4. Lubuklinggau Selatan II	20.801	560
5. Lubuklinggau Timur I	23.624	1.699
6. Lubuklinggau Timur II	29.869	2.950
7. Lubuklinggau Utara I	13.966	92
8. Lubuklinggau Utara II	25.533	688
Jumlah Tahun 2004	171.235	426
2003	167.138	416
2002	164.238	409
2001	161.277	402

Sumber: diolah dari *Kota Lubuklinggau Dalam Angka 2004*

Sedangkan bila dirinci berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kota Lubuklinggau mayoritas laki-laki dengan total 86.149 jiwa sedangkan perempuan 85.086 jiwa pada tahun 2004. Perbandingan ini mengalami perubahan bila kita perhatikan angka laki-laki dan perempuan pada tahun 2000 hingga 2002 dimana terjadi kecenderungan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Pada setiap kecamatan dapat kita perhatikan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2004

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Lubuklinggau Barat I	13.489	13.115	26.604
2. Lubuklinggau Barat II	9.519	9.403	18.922
3. Lubuklinggau Selatan I	6.022	5.894	11.916
4. Lubuklinggau Selatan II	10.473	10.328	20.801
5. Lubuklinggau Timur I	11.755	11.869	23.624
6. Lubuklinggau Timur II	15.264	14.605	29.869
7. Lubuklinggau Utara I	6.979	6.987	13.966
8. Lubuklinggau Utara II	12.648	12.885	25.533
Jumlah Tahun 2004	86.149	85.085	171.235
2003	84.368	82.770	167.138
2002	82.106	82.132	164.238
2001	80.593	80.864	161.277
2000	78.995	79.262	158.257

Sumber: diolah dari Kota Lubuklinggau Dalam Angka 2004

Dari segi usia – seperti yang tampak pada tabel 4 di bawah – mayoritas penduduk Kota Lubuklinggau tergolong pada usia muda dan usia sekolah. Masih cukup sedikit penduduk usia produktif yaitu usia antara 20 tahun hingga 55 tahun. Hal ini bisa terjadi karena Kota Lubuklinggau secara administratif baru diresmikan pada tahun 2001 sebagai daerah otonom sehingga pencatatan dan administrasi kependudukan masih sangat terbatas. Demikian juga pertumbuhan penduduk baru terlihat cukup besar antara tahun 2003 dan 2004 seperti pada tabel di atas.

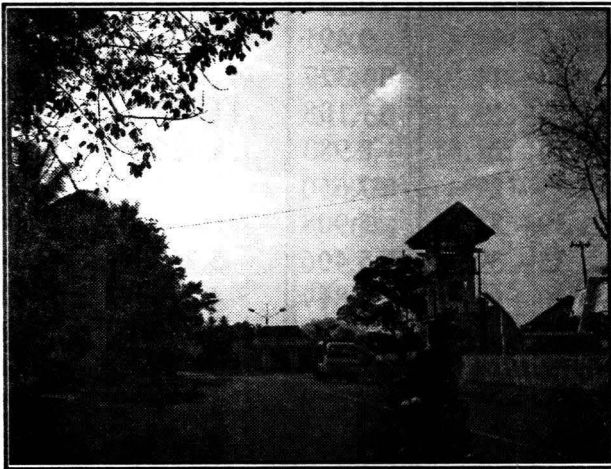
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2004

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Pria	Wanita	
0 – 4	9.791	9.771	19.562
5 – 9	9.491	9.995	19.486
10 – 14	11.327	11.193	22.520
15 – 19	11.108	11.527	22.635
20 – 24	8.983	8.644	17.627
25 – 29	7.650	7.277	14.927
30 – 34	5.908	6.054	11.962
35 – 39	5.406	5.762	11.168
40 – 44	4.817	4.270	9.087
45 – 49	3.495	3.056	6.551
50 – 54	2.499	2.109	4.608
55 – 59	1.729	1.528	3.257
60 – 64	1.599	1.522	3.121
+ 65	2.346	2.378	4.724
Jumlah	86.149	85.085	171.235

Sumber: Kota Lubuklinggau Dalam Angka 2004



Gambar 3. Daerah Perbatasan Kota Lubuklinggau dengan Kabupaten Rejang Lebong (Sumber: dok penulis)



Gambar 4. Gapura Perbatasan Kota Lubuklinggau dengan Kabupaten Rejang Lebong (Sumber: dok penulis)

Di bidang agama, mayoritas penduduk menganut agama Islam, disusul agama Buddha, Kristen, Katolik, dan Hindu. Khusus agama Buddha penganutnya berasal dari etnis Tionghoa yang bertempat tinggal di Kecamatan Lubuklinggau Timur I dan II. Sedangkan penganut agama Kristen dan Katolik mayoritas berasal etnis Batak, Jawa, dan sebagian Tionghoa. Kehidupan beragama ini didukung dengan tersedianya sarana ibadah bagi masing-masing penganutnya. Seperti mesjid (132 buah), langgar (62 buah), mushala (12), gereja (7 buah), vihara (6 buah), dan pura belum terdata. Jumlah penganut masing-masing agama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau Berdasarkan Agama Tahun 2004

Kecamatan	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha
1. Lubuklinggau Barat I	32.121	75	521	57	20
2. Lubuklinggau Barat II	19.539	68	368	35	17
3. Lubuklinggau Selatan I	11.579	-	25	-	-
4. Lubuklinggau Selatan II	20.520	20	8	-	7
5. Lubuklinggau Timur I	22.334	45	134	-	149
6. Lubuklinggau Timur II	19.748	1.923	2.587	111	3.164
7. Lubuklinggau Utara I	7.583	4	52	-	-
8. Lubuklinggau Utara II	6.104	3	18	-	-
Jumlah	139.528	2.138	3.713	203	3.357

Sumber: Kota Lubuklinggau Dalam Angka 2004

Berdasarkan data Kota Lubuklinggau pada tahun 2008²³ jumlah penduduk Kota Lubuklinggau tahun 2008 sebanyak 183.580 jiwa atau bertambah sekitar 16 persen dari angka jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2000. Rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1,89 persen. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah 92.901 orang laki-laki dan 90.679 orang perempuan, yang berarti seks rasio sebesar 102,45.

Struktur umur penduduk Kota Lubuklinggau tergolong penduduk “muda” karena proporsi penduduk di bawah 15 tahun masih cukup tinggi, yaitu hampir 30 persen dan penduduk tua (umur diatas 60 tahun) tidak mencapai 5 persen.

Distribusi penduduk menurut kecamatan tidak merata. Dari delapan kecamatan yang ada di Kota Lubuklinggau, Kecamatan Lubuklinggau Timur II memiliki jumlah penduduk paling banyak (17,40 persen), kemudian diikuti oleh Kecamatan Lubuklinggau Barat I (15,36 persen), dan Kecamatan Lubuklinggau Utara II (14,86 persen). Sedangkan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit (7,17 persen).

D. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Kota Lubuklinggau merupakan masyarakat yang heterogon dengan latar belakang budaya, adat Istiadat, pendidikan, agama yang berbeda. Keanekaragaman budaya ini melahirkan budaya baru dilingkungan masyarakat yang merupakan pencampuran budaya asli daerah Linggau dengan budaya dari daerah lainnya.

²³ Dikutip dari <http://lubuklinggau.go.id/detailsly.php?recordID=3>

Secara budaya, wilayah Kabupaten Musi Rawas termasuk juga wilayah Kota Lubuklinggau merupakan wilayah kebudayaan suku bangsa Musi, Rawas, Rejang, Lembak (istilah setempat disebut Orang Dusun). Penduduk asli ini berbaur dengan para pendatang dari dalam Provinsi Sumatera Selatan maupun dari luar. Sehingga tidak jarang kelihatan adanya perkumpulan etnis dari berbagai daerah seperti Ikatan Keluarga Minangkabau, Ikatan Keluarga Komerling Ulu, Ikatan Keluarga Rawas Ulu, Ikatan Keluarga Lintang Empat Lawang, Ikatan Keluarga Palembang, dan lain-lain.

Dalam kehidupan sehari-hari penggunaan bahasa daerah masing-masing dalam berinteraksi antarsesama satu suku bangsa masih sangat kental. Sedangkan dalam forum umum dan interaksi dengan yang bukan satu suku bangsa menggunakan bahasa Palembang logat setempat. Penggunaan bahasa Indonesia dialek Lubuklinggau hanya dipergunakan bila bertemu dengan orang luar yang tidak memahami bahasa setempat.

Pembangunan bidang keagamaan merupakan aspek yang penting dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Hal ini tidak terlepas dari sarana tempat ibadah yang memadai. Pada tahun 2008 jumlah tempat ibadah umat Islam baik masjid, musholla, ataupun langgar bertambah 62 bangunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan tempat ibadah umat yang lain, seperti gereja dan vihara jumlahnya sama seperti tahun sebelumnya.

Pengurusan jamaah haji juga merupakan bentuk lain dari pembangunan di bidang keagamaan khususnya umat Islam. Pada tahun 2008 jumlah jamaah haji yang diberangkatkan dari Kota Lubuklinggau berjumlah 239 orang, terdiri dari 94 orang jamaah laki-laki dan 145 orang jamaah

perempuan. Jumlah tersebut turun 18,71 persen dibanding tahun sebelumnya.²⁴

Jumlah keluarga yang termasuk dalam kategori prasejahtera pada tahun 2008 sebanyak 4.410 atau 10,08 persen dari seluruh keluarga yang ada di Kota Lubuklinggau. Keluarga kategori sejahtera I berjumlah 8.067 keluarga atau 18,44 persen. Secara absolut maupun secara relatif, jumlah keluarga yang termasuk dalam kategori prasejahtera dan sejahtera I mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan keluarga di Kota Lubuklinggau.²⁵

Adapun jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) tahun 2008 sebanyak 12.581 rumah tangga. Rumah tangga penerima bantuan raskin pada tahun 2008 sebanyak 12.709 rumah tangga. Penerima asuransi kesehatan untuk keluarga miskin (Jamkesmas-Jaminan Kesehatan Masyarakat) pada tahun 2008 sebanyak 12.738 keluarga yang mencakup 50.957 penduduk.

Penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kota Lubuklinggau juga tidak terlepas dari peran institusi masyarakat atau swasta. Antara lain, dengan keberadaan enam buah panti asuhan yang menampung sebanyak 329 anak asuh.

Masalah ketenagakerjaan juga mengalami berbagai persoalan terutama semakin meningkatnya angka angkatan kerja. Menurut data di Kota Lubuklinggau²⁶ jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di Kota Lubuklinggau pada tahun 2008 sebanyak 132.615 orang. Jumlah angkatan kerja diperkirakan sebanyak 82.390 orang, terdiri dari 54.615 orang

²⁴ Dikutip dari <http://lubuklinggau.go.id/detailsly.php?recordID=4>

²⁵ Diunduh dari <http://lubuklinggau.go.id/detailsly.php?recordID=4>

²⁶ Diunduh dari <http://lubuklinggau.go.id/detailsly.php?recordID=3>

angkatan kerja laki-laki dan 27.775 orang angkatan kerja perempuan (hasil Sakernas 2008). Jumlah angkatan kerja dirinci menurut kegiatannya adalah sebanyak 71.272 orang bekerja dan 11.118 orang pengangguran (sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja). Dengan kata lain tingkat kesempatan kerja sebesar 86,51 persen dan tingkat pengangguran sebesar 13,49 persen.

Komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa sektor tersier sebagai ciri perekonomian daerah perkotaan merupakan pekerjaan yang dominan dilakukan oleh penduduk Kota Lubuklinggau. Pada tahun 2008 sekitar 62 persen penduduk bekerja di sektor tersier (perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa). Sektor sekunder (pertambangan, industri, listrik, dan bangunan) menyerap sekitar 11 persen tenaga kerja, sedangkan sektor primer (pertanian) menyerap hampir 27 persen tenaga kerja.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2008 sebanyak 1.489 orang. Dari jumlah tersebut yang sudah ditempatkan sebanyak 755 orang atau sekitar 51 persen dari jumlah pencari kerja. Dari jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja hampir seluruhnya (sekitar 98 persen) berpendidikan SLTA ke atas atau dalam istilah ketenagakerjaan disebut pencari kerja terdidik.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemerintah telah berupaya menaikkan UMR. Pada tahun 200 UMR Kota Lubuklinggau sebesar Rp 743.000,-. UMR yang ditetapkan ini masih dibawah KHM, yaitu sebesar Rp 876.740,-. Bila dilihat menurut sector (Upah Minimum

Sektoral), tertinggi adalah pada sektor bangunan, yaitu sebesar Rp. 980.000,- sebulan, sedangkan terendah adalah di sektor pertanian, yaitu Rp. 807.000,- sebulan.

E. Sarana

Sebagai sebuah daerah yang baru memiliki otonomi, banyak fasilitas pemerintah yang sebelumnya milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai kabupaten induk yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau. Fasilitas-fasilitas yang berada di wilayah Kota Lubuklinggau sebagian besar masih dikuasai oleh Pemkab Musi Rawas.

Salah satu fasilitas yang berada di wilayah Kota Lubuklinggau namun masih dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas adalah Bandara Salampari yang berada di Kecamatan Lubuklinggau Selatan. Bandar ini dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan diresmikan pada tanggal 7 Mei 1994. Setelah diresmikan bandara ini hanya selama 4 bulan sempat didarati pesawat komersial rute Palembang – Lubuklinggau. Pada tahun 2001 – 2002 bandara ini sempat dijadikan sebagai bandara bagi pesawat perusahaan pertambangan swasta dua kali seminggu. Menurut walikota Lubuklinggau, bila bandara ini diserahkan ke Pemerintah Kota, akan dikelola dan dikembangkan sebagai bandara transportasi udara yang menghubungkan Lubuklinggau – Jakarta – Palembang. Hal ini berkaitan dengan semakin tingginya intensitas perdagangan di daerah ini.

Selain itu, hadirnya pasar induk akan menambah laju perkembangan sektor niaga yang selama ini telah menjadi tulang punggung perekonomian kota yang berbukit-bukit ini. Sebanyak 37,1 persen kegiatan ekonomi berasal dari lapangan usaha ini serta hampir seperenam atau tepatnya 16,5 %

penduduk pun mengandalkan sektor ini untuk mengepulkan asap dapur.

Dalam penerimaan asli daerah, retribusi dari pasar inpres dan pasar satelit Ulak Sarung di Kecamatan Lubuklinggau Timur telah mencapai 60 persen dari total retribusi daerah yang ditarik. Ini belum termasuk parkir, sampah, dan lain-lain. Pemasukan itu didapat dari 600-an kios dan 190-an los yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. Selain untuk mencapai tata letak yang lebih terpadu, niat pendirian pasar inpres baru timbul berkaitan dengan kondisi pasar inpres yang ada saat ini. Dua blok pasar di pusat kota telah memunculkan kemacetan. Apalagi, tempat jual beli ini berada di antara lokasi gedung-gedung instansi milik dua pemerintah daerah: Kota Lubuklinggau di sebelah barat serta Kabupaten Musi Rawas di sebelah timur. Maklum, meski telah resmi mekar dari sang induk, kota yang berada 129 meter di atas permukaan laut ini masih menjadi ibu kota pemerintahan Kabupaten Musi Rawas.

Sarana transportasi lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah Kereta Api yang menghubungkan stasiun Kalimantan di Lubuklinggau dengan Stasiun Kertapati di Palembang. Akhir-akhir ini penumpang kereta api justru menyusut. Padahal, apabila dibandingkan dengan kendaraan darat, kereta api yang menghubungkan antara Kertapati, Palembang, dan Lubuklinggau lebih cepat mengingat jalan menuju Palembang kurang baik kondisinya. Selama kurun tahun 1999 hingga

2002, jumlah penumpang turun rata-rata 6,6 persen per tahun. Begitu pula dengan barang yang diangkut, susut rata-rata 3,8 persen per tahun. Komoditas yang diangkut dari Lubuklinggau menuju Palembang adalah karet berbentuk lembaran yang berasal dari Lubuklinggau sendiri dan Kabupaten Musi Rawas. Ketika kembali dari Palembang, kereta mengangkut BBM.

Di bidang perekonomian wilayah Kota Lubuklinggau menjadi sangat strategis. Dalam situs pemerintah Kota Lubuklinggau menjelaskan pentingnya posisi tersebut.²⁷ Posisi wilayah Kota Lubuklinggau yang terletak di daerah persimpangan (transit) dari beberapa kota di Propinsi Sumatera Selatan dan kota-kota lain di luar Propinsi Sumatera Selatan seperti Jambi, Bengkulu, dan Padang sangat menunjang perkembangan sektor perhubungan dan komunikasi. Dengan tersedianya sarana/prasarana perhubungan seperti jalan raya, jembatan, angkutan yang memadai, maka distribusi barang dan jasa dari sentra produksi ke tempat konsumen dapat berjalan dengan lancar. Hal ini memberikan kecenderungan terhadap kestabilan harga barang dan peningkatan volume perdagangan. Dampak positif lain adalah meningkatnya mobilitas penduduk, juga tumbuhnya aktivitas di sektor lainnya seperti perdagangan, hotel dan restoran, pariwisata serta sektor jasa lainnya.

Sarana dan prasarana perhubungan darat di Kota Lubuklinggau antara lain jalan raya dan jalur kereta api. Prasarana jalan sangat diperlukan dalam memperlancar kegiatan ekonomi, perpindahan penduduk maupun kegiatan perdagangan antar wilayah. Pada tahun 2008 panjang jalan yang tersedia seluruhnya mencapai 386,220 km, terdiri dari

²⁷ Diunduh dari <http://lubuklinggau.go.id/detailsly.php?recordID=8>

48,110 km jalan nasional, 4,600 km jalan propinsi, dan 333,510 km jalan kabupaten/kota.

Jalan yang ada saat ini sebagian besar berupa jalan aspal, namun juga masih terdapat jalan tanah sepanjang 14,610 km. Jalan tersebut sebagian besar dalam kondisi rusak ringan sepanjang 221,115 km, bahkan sepanjang 125,420 km dalam kondisi rusak berat. Jalan dengan kondisi baik hanya 50,840 km.

Jalur kereta api di Kota Lubuklinggau menghubungkan Kota Lubuklinggau dengan wilayah di Kabupaten Lahat, Muara Enim, Kota Prabumulih, dan Kota Palembang. Lalu lintas barang dan penumpang dengan kereta api berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 lalu lintas barang/cargo berkurang dari tahun sebelumnya menjadi 7.231 ton. Sedangkan lalu lintas penumpang mengalami peningkatan sekitar 14, 80 persen dari tahun sebelumnya menjadi 197.479 orang.

Di bidang pendidikan berdasarkan data Pemerintah Kota Lubuklinggau tahun 2008²⁸ disebutkan bahwa Peningkatan jumlah sekolah pada dasarnya merupakan salah satu upaya dalam rangka menyediakan fasilitas pendidikan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendidikan masyarakat tersebut. Sarana pendidikan berupa jumlah sekolah di Kota Lubuklinggau pada tahun ajaran 2008/2009 mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah sekolah Taman Kanak-Kanak bertambah dari 43 menjadi 45, bertambah 2 TK swasta. Jumlah Sekolah Dasar (SD) negeri berkurang satu dari 86 menjadi 85, namun SD swasta bertambah dari 4 menjadi 5. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat

²⁸ Dikutip dari <http://lubuklinggau.go.id/detailsly.php?recordID=9>

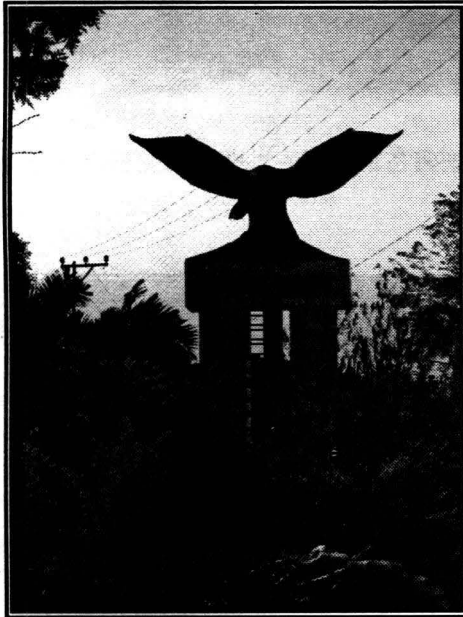
Pertama (SLTP) baik negeri maupun swasta sama seperti tahun sebelumnya, masing-masing 13 dan 15. Sekolah Menengah Umum (SMU) negeri tetap 7, sedangkan SMU swasta berkurang dari 18 menjadi 16. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta tidak berubah, masing-masing 3 dan 6.

Selain sekolah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Nasional, juga terdapat sekolah yang berada di bawah pengelolaan Departemen Agama, yaitu masing-masing 6 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 7 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 9 Madrasah Aliyah (MA).

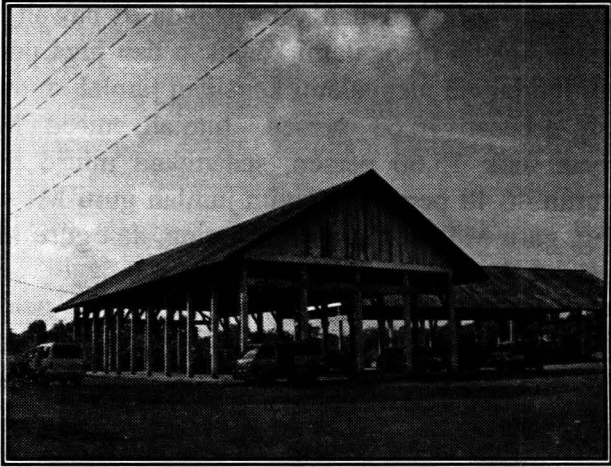
Sarana untuk masing-masing tingkatan sekolah itu digunakan oleh sejumlah murid, baik negeri maupun swasta, yang jumlahnya mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Sejalan dengan perubahan jumlah sarana pendidikan dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka jumlah murid pada tahun ajaran 2008/2009 juga mengalami perubahan dibanding tahun ajaran sebelumnya. Jumlah murid TK pada tahun ajaran 2008/2009 meningkat 12,68 persen dari tahun ajaran sebelumnya. Jumlah murid SD turun 2,45 persen. Jumlah murid SLTP dan SMU naik masing-masing 7,48 persen dan 7,47 persen. Jumlah murid SMK mengalami penurunan signifikan, yaitu sebesar 35,74 persen.

Tenaga guru yang tersedia baik sekolah negeri maupun swasta pada semua jenjang pendidikan pada tahun ajaran 2008/2009 juga mengalami perubahan dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Jumlah guru pada tahun ajaran 2008/2009 untuk TK sebanyak 179 orang, SD sebanyak 1.300 orang, SLTP sebanyak 852 orang, SMU sebanyak 770 orang, dan SMK sebanyak 325 orang.

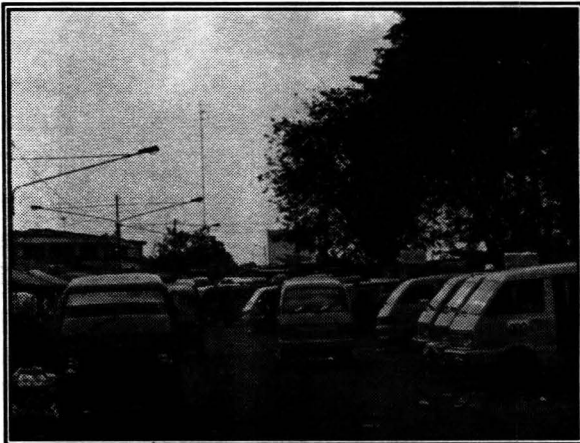
Jumlah murid sekolah yang berada di bawah naungan Departemen Agama mengalami kenaikan dan juga penurunan. Madrasah Ibtidaiyah mengalami kenaikan jumlah murid secara signifikan sebesar 76,63 persen. Jumlah murid Madrasah Tsanawiyah naik 15,66 persen, sedangkan murid Madrasah Aliyah turun 46,40 persen. Adapun jumlah guru MI sebanyak 207 orang, guru MTs sebanyak 171 orang, dan guru Madrasah Aliyah sebanyak 118 orang.



Gambar 5. Tugu Logo Sumatera Selatan di Perbatasan
(Sumber: dok penulis)



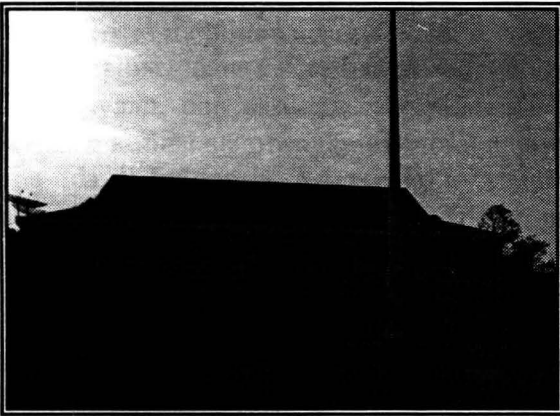
Gambar 6. Terminal Watas (Sumber: dok penulis)



Gambar 7. Terminal Kalimantan (sumber: dok penulis)



Gambar 8. Pemukiman Penduduk Bengkulu di Perbatasan
(sumber: dok penulis)



Gambar 9. Kantor Walikota Lubuklinggau
(sumber: dok penulis)



Gambar 10. Kota Lubuklinggau malam hari
(sumber: dok penulis)

BAB III

DINAMIKA DAN BENTUK INTERAKSI SOSIAL

A. Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk terutama dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Tidak ada angka yang menyebutkan tentang tingginya tingkat mobilitas penduduk. Namun secara nyata kelihatan di Kota Lubuklinggau pada siang hari jumlah penduduk cukup banyak. Hal ini berbeda jauh dengan kenyataan pada malam hari yang relatif sangat sepi. Hal ini diakui beberapa informan bahwa penduduk Lubuklinggau pada siang hari kebanyakan adalah para pendatang dari berbagai daerah dan sore harinya kembali ke daerah mereka masing-masing. Aktivitas ngelaju ini merupakan pemandangan rutin setiap hari sebagai dampak dari posisi Kota Lubuklinggau sebagai kota lintas dan kota transit.

Adanya proses mobilitas penduduk ini merupakan salah satu strategi adaptasi manusia terhadap lingkungan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan ekologi.²⁹ Perpindahan penduduk juga terjadi akibat ketidakseimbangan ekonomi antara berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Adanya faktor pendorong dan penarik suatu daerah tujuan merupakan faktor pendukung terjadinya mobilitas penduduk. Kurangnya sumber-sumber kebutuhan hidup di daerah asal menjadi faktor pendorong penduduk meninggalkan daerahnya sedangkan sumber-sumber hidup yang terdapat di daerah tujuan menjadi faktor penarik untuk pindah ke daerah tersebut. Dari pernyataan ini, Kota

²⁹ Guy Standing. 1987. *Konsep-Konsep Mobilitas di Negara Sedang Berkembang*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Hal. 1

Lubuk linggau dengan berbagai fasilitas yang dimilikinya sebagai faktor penarik kaum migran untuk mengunjungi daerah ini.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama terjadinya mobilitas penduduk. Ketersediaan kebutuhan sekunder seperti peralatan rumah tangga, pakaian, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh penduduk di pedalaman di luar Kota Lubuklinggau merupakan alasan untuk mendatangi daerah sumber kebutuhan tersebut. Seperti penduduk daerah Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan daerah penghasil sayur-sayuran dan hasil pertanian lainnya, Kota Lubuklinggau merupakan daerah pemasaran hasil pertanian yang dipasarkan langsung petani maupun oleh para agen yang datang dari Lubuklinggau ataupun agen dari daerah Curup. Sebaliknya Kota Lubuklinggau sebagai daerah perdagangan, menjadi daerah tujuan para penduduk di luar kota untuk menghasilkan kebutuhan-kebutuhan non pertanian. Proses sirkulasi ini terjadi terus menerus setiap hari sehingga perputaran ekonomi di daerah Lubuklinggau cukup tinggi.

Tidak adanya batasan yang nyata antara penduduk Kota Lubuklinggau dengan Kabupaten Musi Rawas sehingga menyulitkan untuk membatasi konsep mobilitas penduduk di kedua daerah. Penduduk kedua daerah menganggap bahwa mereka tidak pernah dibatasi oleh administratif pemerintahan sehingga tidak perlu adanya suatu hambatan dalam mobilitas mereka. Di samping itu jarak antara Kota Lubuklinggau dengan beberapa kecamatan ataupun desa di Kabupaten Musi Rawas yang tidak begitu jauh sehingga batas administratif tidak menjadi acuan. Penduduk sendiri merasa bahwa mereka tidak meninggalkan Kabupaten Musi Rawas bila pergi ke Kota Lubuk linggau. Seperti penduduk Kecamatan Tugumulyo

ataupun Kecamatan Rawas Ulu yang masuk dalam Kabupaten Musi Rawas namun dekat dengan pusat Kota Lubuklinggau. Hasil pertanian mereka dipasarkan di Pasar Lubuklinggau (Jalan Kalimantan) dan membawa barang-barang sekunder seperti kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan lainnya sebagai ganti dari penjualan hasil pertanian mereka. Tidak terfokus hanya pada daerah tersebut, pendistribusian hasil pertanian dari beberapa daerah di Kabupaten Musi Rawas juga sampai ke Curup Kabupaten Rejang Lebong, seperti beras dan beberapa jenis buah-buahan yang berasal dari Kecamatan Tugumulyo dipasarkan hingga ke Curup.

Posisi kota yang berada pada jalur lintas Sumatera juga memberi pengaruh tumbuhnya aktivitas ekonomi. Berbagai jenis mobil penumpang seperti bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dari dan ke Jakarta atau dari dan ke Bengkulu selama duapuluh empat jam selalu melintasi kota ini. Meski dari sisi kuantitas, kontribusi transportasi tak terlalu berarti terhadap perekonomian kota, diakui efek samping kegiatan angkutan ini justru menopang sektor lainnya. Para pengguna alat angkut yang melalui jalan lintas Sumatera biasa berhenti dan istirahat di Lubuklinggau. Ruko-ruko berjajar di sepanjang tepian jalan menyambut pengujung. Unikny, jika terminal-terminal besar lain menyusut pengunjungnya akibat maskapai penerbangan banting harga, terminal Simpang Priuk yang proses penyerahan dari Pemkab Musi Rawas ke Pemkot Lubuklinggau belum selesai ini tak terganggu. Jumlah bus yang mampir tetap stabil, sekitar 175 hingga 220 bus AKAP dan 25 bus AKDP per hari. Bila bulan puasa dan musim mudik tiba, hotel-hotel, mulai dari kelas melati hingga berbintang dua, penuh. Sampai pertengahan 2003, tak kurang 18 hotel melati, sebuah hotel

bintang satu, dan sebuah hotel bintang dua siap melayani tamu.³⁰

Dalam perkembangan masyarakat di wilayah perbatasan dewasa ini, dimana sistem perdagangan telah menjadi kekuatan besar, berbagai fasilitas transportasi telah memungkinkan terjadinya mobilitas sedemikian intensif. Setiap orang dalam dunia yang serba cepat seakan-akan bergerak terus menerus meninggalkan batas-batas wilayah kebudayaan. Arjun Appadurai³¹ mengatakan bahwa mobilitas merupakan fenomena sosial, ekonomi, dan politik “terpenting” di abad ke-20. Kecendrungan ini memperlihatkan bahwa batas-batas kebudayaan mulai mengabur karena orang/kelompok orang memiliki kemampuan bergerak begitu cepat ke tempat yang berbeda dan kemudian menjadi bagian dari suatu tempat tertentu dengan *setting* kultural yang berbeda. Dalam situasi ini terjadi proses “reproduksi sosial”, teritorial dan kebudayaan terhadap identitas kelompok yang sedang berubah akibat proses migrasi dalam berbagai skala.

I. Penguasaan Sumber Produksi dan Interaksi Bidang Ekonomi

Berdasarkan data tahun 2004 sektor pertanian hanya memberikan sumbangan bagi pendapatan asli daerah Kota Lubuklinggau sebesar 6,84%. Artinya pertanian bukan sektor yang dominan bagi perekonomian daerah ini.

³⁰ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/23/otonomi/640773.htm>

³¹ dalam Irwan Abdullah, “Globalisasi, Gaya Hidup Kota, dan Relokasi Kebudayaan”, Makalah pada Simposium Internasional Journal Antropologi ke-2, Universitas Andalas Padang 18 – 21 Juli 2001, hal. 4

Produksi tanaman pangan terutama padi pada tahun 2004 mencapai 12.084 ton yang terdiri dari 11.754 ton padi sawah dan 330 ton padi ladang. Rata-rata produksi padi sawah mencapai 41.10 kwintal/hektar, sedangkan untuk padi ladang 25,0 kwintal/hektar. Bila dibandingkan dengan tahun 2003, angka produksi maupun produktivitas tanaman padi tahun 2004 mengalami penurunan. Produksi padi menurun sebesar 14,73 persen dan produktivitasnya menurun 16,97 persen. Sedangkan untuk padi ladang produksinya turun drastis hingga mencapai 65,41 persen dan penurunan produktivitasnya sebesar 9,09 persen.³² Selain tanaman pangan, tanaman jenis lain seperti hortikultura masih sangat kurang baik dari luas areal maupun produktivitasnya sehingga tidak memberikan sumbangan yang signifikan dalam pendapatan daerah. Demikian juga dalam bidang peternakan dan perikanan. Dalam bidang ini belum ada pengelolaan secara profesional sebagai salah satu sentra produksi melainkan hanya dikelola secara tradisional oleh penduduk setempat.

Daerah penghasil padi di Kota Lubuklinggau terutama adalah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I (mencakup Kecamatan Lubuklinggau Selatan II). Pada tahun 2004 luas tanaman padi di kecamatan ini seluas 1.194 hektar dan produksinya mencapai 4.901 ton atau sebesar 40 persen lebih dari total produksi padi di Kota Lubuklinggau.³³

Kebutuhan pangan dan sayur mayur bagi penduduk Lubuklinggau didatangkan dari Kabupaten Rejang Lebong. Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang potensial di bidang pertanian sayur mayur mengundang para pedagang atau pun

³² BPS Kota Lubuklinggau. 2004. *Lubuklinggau Dalam Angka 2004*. BPS Kota Lubuklinggau. Hal. 131.

³³ Ibid hal. 131.

agen dari Kota Lubuklinggau untuk datang ke daerah Kabupaten Rejang Lebong. Aktivitas ini akan ramai kelihatan pada tengah malam menjelang subuh. Mobil-mobil pick up cukup ramai masuk ke Lubuklinggau dari Bengkulu membawa sayuran dan hasil pertanian ladang lainnya. Kondisi ini didukung oleh keadaan alam yang saling mendukung. Kabupaten Rejang Lebong kaya akan hasil pertanian berupa sayur-sayuran, cabe, tomat, dan buah-buahan. Sedangkan Kota Lubuklinggau sebagai daerah penghasil beras dan jenis tanaman keras lainnya. Dengan kondisi ini antara kedua daerah ini saling bertukar hasil pertanian. Hasil pertanian tersebut dipasarkan di Pasar Inpres dan Pasar Satelit Ulak Sarung Lubuklinggau. Pasar ini menjadi pusat perdagangan dari berbagai daerah Kabupaten Musi Rawas maupun dari luar Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan para pedagang umumnya justru datang dari luar Kota Lubuklinggau.

Dalam penerimaan asli daerah, retribusi dari Pasar Inpres dan Pasar Satelit Ulak Sarung di Kecamatan Lubuklinggau Timur telah mencapai 60 % dari total retribusi daerah yang ditarik. Ini belum termasuk parkir, sampah, dan lain-lain. Pemasukan itu didapat dari 600-an kios dan 190-an los yang menjual beragam kebutuhan masyarakat

J. Interaksi Bidang Budaya

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.³⁴ Suatu

³⁴ Soerjono Soekantor. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 67

proses interaksi sosial dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati yang dapat bergerak sendiri-sendiri maupun bersamaan.

Konsep masyarakat perbatasan secara spesifik dapat dikelompokkan pada dua konsep, yaitu:

1. Masyarakat yang berada di daerah perbatasan secara administratif pemerintahan seperti perbatasan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara. Masyarakat yang berada di daerah perbatasan ini dipisahkan oleh batas-batas administratif, namun secara budaya belum tentu berbeda (masyarakatnya dari latar belakang budaya yang sama). Salah satu contoh daerah perbatasan dengan budaya yang sama adalah perbatasan Kabupaten Kaerom (Papua) dengan Papua New Guinea. Secara administratif masyarakat ini berada di dua negara yang berbeda tetapi memiliki budaya yang sama. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar-penduduk yang terdapat di kedua sisi perbatasan, menyebabkan *klaim* terhadap hak-hak tradisional dapat berkembang menjadi masalah kompleks di kemudian hari.³⁵
2. Masyarakat yang berada di perbatasan budaya yaitu masyarakat pendukung suatu kebudayaan yang berada di perbatasan wilayah kebudayaan suku bangsa lain. Wilayah kebudayaan tidak dapat dipisahkan oleh batas-batas administratif pemerintahan karena suatu wilayah kebudayaan ditentukan oleh luas cakupan/ penguasaan budaya suatu suku bangsa. Contoh wilayah kebudayaan

³⁵ Nukila Evanty,. "Regulasi tentang Batas Wilayah NKRI" (<http://www.Suarapembangunan.com/news/2004/08/13>)

suku bangsa Minangkabau yang meliputi beberapa wilayah seperti wilayah Provinsi Sumatera Barat, sebagian Provinsi Riau hingga Negeri Sembilan Malaysia. Masyarakat yang berada di daerah perbatasan ini memungkinkan berlangsungnya proses asimilasi, akulturasi, ataupun amalgamasi sebagai akibat dari interaksi secara terus menerus antarkedua budaya yang berbeda seperti yang terjadi di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Sumatera Barat³⁶

Hubungan antarindividu maupun kelompok di daerah perbatasan telah menghasilkan interaksi sosial sebagai dampak dari terjadinya kontak sosial dan komunikasi³⁷. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia³⁸. Ada dua kemungkinan yang terjadi dalam interaksi yaitu saling mempertahankan etnisitasnya atau saling memberi dan menerima unsur-unsur budaya daerah tempat/arena interaksi berlangsung. Bila asumsi pertama terjadi, kondisi ini akan memungkinkan terjadinya konflik antar-suku bangsa, sedangkan bila asumsi kedua yang terjadi kemungkinan besar akan melahirkan sebuah variasi budaya baru atau bahkan

³⁶ Rois Leonard Arios, dkk. 2003. *Identitas Masyarakat Perbatasan: Kasus di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman*. Padang: BKSNT Padang.

³⁷ Kontak Sosial dan Komunikasi adalah syarat terjadinya interaksi sosial. Baca Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 71.

³⁸ *Ibid.* Hal. 67

menciptakan etnis baru sebagai gabungan dari unsur-unsur budaya yang berinteraksi.

Masyarakat Kota Lubuklinggau tidak dapat dianalisa berdasarkan batasan wilayah administratif saja melainkan berdasarkan wilayah kebudayaan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan beberapa suku bangsa memiliki wilayah kebudayaan hingga meliputi Kota Lubuklinggau. Sehingga dalam menganalisa interaksi antarsuku bangsa meliputi wilayah Kabupaten Musi Rawas yang berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Muara Enim.

Suku bangsa asli penduduk Kabupaten Musi Rawas termasuk Kota Lubuklinggau adalah Orang Musi yang meliputi antara lain wilayah Terawas, Muara Kelingi, Tugu Mulyo, dan Muara Lakitan hingga ke Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Orang Rawas meliputi antara lain Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas hingga ke batas Provinsi Jambi. Orang Lembak meliputi wilayah eks marga Sindang Kelingi yaitu dari Muara Kelingi (Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong) hingga daerah hulu Kelingi di Kabupaten Musi Rawas. Orang Rejang yaitu meliputi Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu hingga Kota Lubuklinggau.

Khusus Orang Lembak atau Orang Dusun³⁹ memiliki wilayah kebudayaan meliputi Kabupaten Rejang Lebong yaitu Desa Kepala Curup, Tanjung Aur, Blitar, dan Plalo; Desa Ramayu Kabupaten Musi Rawas di bagian selatan, Desa Air

³⁹ Menurut istilah di Kelurahan Watas Kecamatan Lubuklinggau Barat

Lakitan di bagian barat, dan Desa Muara Saling di bagian timur.

Berdasarkan catatan Belanda pada tahun 1915 – 1919, Winklen dan Westenenk membagi penduduk Keresidenan Bengkulu dalam 4 suku bangsa yaitu:⁴⁰

1. Melayu Tengah (Midden Maleiers) yang terdiri dari:
 - Orang Lembak Sindang Utara Pematang Danau di Pelana antara Gunung Kaba dan Gunung Kelam (gunur merapi);
 - Orang Lembak Bliti dalam daerah arus sungai Itam dan Sungai Bengkulu;
 - Orang Pasemah di hulu Air Manna, di daerah Padang Guci, di Ulu Air Kinal, dan di beberapa dusun dalam *onder-district* Talo;
 - Orang Semendo di hulu Loewas dalam *afdeeling* Kaur beserta orang-orang di Marga Way Tenong dan Way Napal dalam *afdeeling* Kaur;
 - Orang Makakau di hulu Air Nasal, juga berasal dari suku Semendo Darat dan Orang Kaur yang tinggal di marga pesisir *afdeeling* Kaur;
 - Orang Serawai di *afdeeling* Manna, Seluma, dan sebagian dari Bengkulu;
2. Rejang yang terdapat di Kepahyang, Curup dan sekitarnya, sekitar Taba Penanjung, dalam *onderafdeeling* Lebong, dan Sepanjang Ketahun;
3. Lampung;
4. Minang

⁴⁰Abdullah Siddik. 1996. *Sejarah Bengkulu: 1500 – 1990*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 125

Pembagian suku bangsa yang dilakukan oleh Winklen dan Westenenk di Bengkulu tersebut masih sangat sederhana karena seperti Orang Rejang memiliki daerah kebudayaan sampai ke daerah Ulu Musi dan Tebing Tinggi Sumatera Selatan. Orang Lembak sendiri juga memiliki daerah kebudayaan asal di daerah Bliti Kabupaten Musi Rawas sehingga tidak bisa dibatasi oleh administrasi pemerintahan.

Terdapat perbedaan antara Orang Lembak di Lubuklinggau dengan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu utara, maupun daerah lainnya. Perbedaan tersebut tampak pada bahasa yang mereka pakai. Bahasa Orang Lembak yang ada di Provinsi Bengkulu lebih mirip atau banyak menggunakan kosa kata suku bangsa Rejang sehingga tidak murni lagi menggunakan bahasa Lembak.

Khusus suku bangsa pendatang di Kota Lubuklinggau cukup banyak sehingga daerah ini sangat multikultural. Para pendatang ini membentuk suatu asosiasi kesukubangsaan sebagai sarana untuk mempererat kesatuan mereka. Beberapa suku bangsa pendatang yang ada antara lain adalah Jawa, Minangkabau, Batak, Palembang, Komerling, Lahat, dan Orang Jambi. Beberapa organisasi kesukubangsaan yang ada di Lubuklinggau antara lain adalah Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu (PMPN) yang memiliki sekretariat di Jalan Yos Sudarso Lubuklinggau, dan Ikatan Keluarga Komerling dengan sekretariat di Jalan Yos Sudarso Lubuklinggau.

Bentuk interaksi yang berlangsung antarsuku bangsa yang berbeda di daerah ini tampak dalam aktivitas perekonomian, keagamaan, sosial kemasyarakatan (lingkungan sosial), dan adat perkawinan. Interaksi di bidang keagamaan terutama didasarkan oleh kesamaan agama dan tampak dalam

aktivitas keagamaan terutama bagi yang beragama Islam sebagai agama yang dominan. Dalam aktivitas keagamaan ini tidak memandang latar belakang suku bangsa tetapi berdasarkan kesamaan akidah. Saling mengunjungi pada saat perayaan hari besar agama Islam seperti idul fitri, idul adha, maupun hari-hari tertentu lainnya. Hal ini dilakukan pada tingkat lingkungan tempat tinggal.

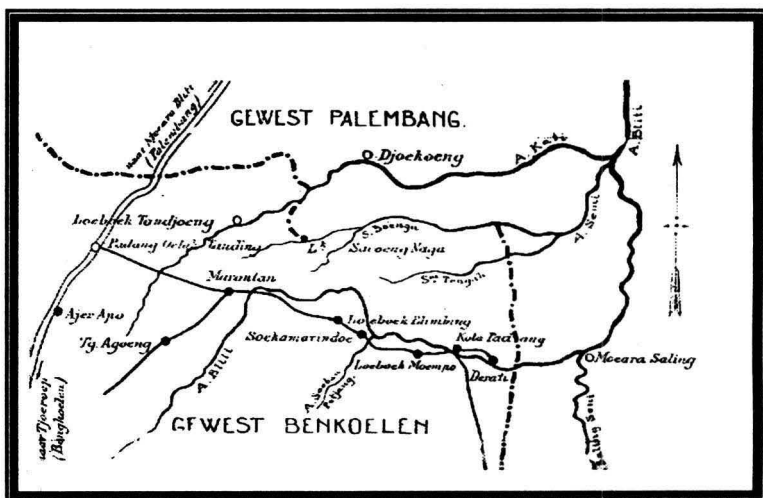
Interaksi di bidang sosial kemasyarakatan tampak dalam bentuk hidup bertetangga, gotong royong, mengunjungi keluarga yang sedang mengalami kesusahaan, menghadiri undangan pesta ataupun kegiatan lainnya. Khusus yang beragama Islam aktivitas lain sebagai bentuk interaksi adalah dalam kegiatan pengajian yang dilaksanakan di rumah-rumah penduduk secara bergiliran.

Perkawinan merupakan salah satu cara mempersatukan dua kebudayaan yang berbeda. Perkawinan antarsuku bangsa (amalgamasi) cukup banyak berlangsung. Perkawinan campuran yang paling banyak berlangsung adalah antara orang Lembak dengan orang Rejang atau dengan orang Musi atau orang Rawas. Pemilihan jodoh pada suku bangsa tersebut didasarkan beberapa kemiripan dalam adat istiadat mereka. Perbedaan yang cukup tampak adalah perbedaan bahasa antara suku bangsa Lembak dengan suku bangsa Rejang. Menurut orang Dusun⁴¹ bahasa Rejang merupakan bahasa yang sangat sulit untuk dipahami, namun sebaliknya Orang Rejang dapat memahami bahasa Lembak.

Perbedaan adat istiadat pada perkawinan campuran dapat diminimalis dengan menyederhanakan proses adat

⁴¹ Sebutan untuk Orang Lembak di Kelurahan Watas Lubuk Durian Kecamatan Lubuklinggau Barat.

perkawinan pada masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama termasuk penetapan pelaksanaan pesta perkawinan. Kebiasaan yang lazim dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Watas dalam perkawinan campuran antara orang Dusun dengan Orang Rejang misalnya, bila pihak perempuan Orang Dusun dan pihak laki-laki Orang Rejang, maka adat yang dipakai adalah adat Orang Dusun, dan pelaksanaan pesta perkawinan dilakukan di tempat pihak perempuan.



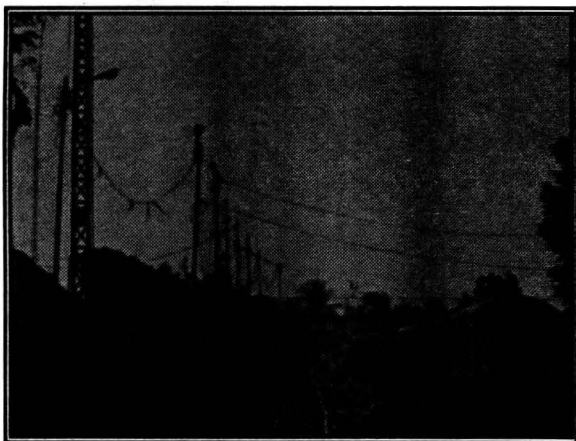
Gambar 11. Peta Sumatera Selatan Pada Masa Pemerintahan Belanda



Gambar 12. Penampilan Kesenian Perantau Minangkabau di Lubuklinggau (sumber: <http://pandan-maninjau.blogspot.com>)



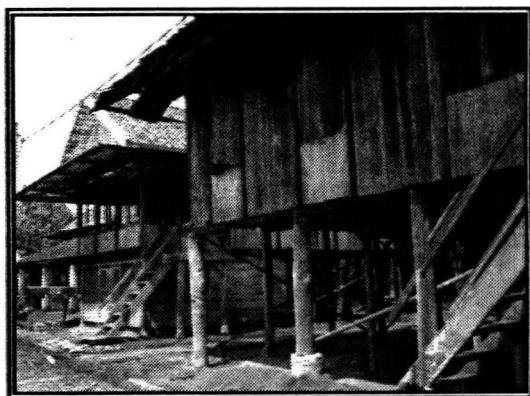
Gambar 13. Salah seorang informan (sumber: dok penulis)



**Gambar 14. Stasiun Kereta Api di Terminal Kalimantan
(sumber: dok penulis)**



**Gambar 15. Aktivitas bongkar muat di terminal Watas
(sumber: dok penulis)**



**Gambar 16. Salah satu bentuk rumah tradisional Rawas
(sumber: dok penulis)**



Gambar 17. Salah satu pemukiman suku bangsa Rawas
(sumber: dok penulis)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kota Lubuklinggau sebagai sebuah daerah administratif merupakan daerah otonom baru sejak tahun 2001 berdasarkan UU No. 7 tahun 2001. Posisi Kota Lubuklinggau yang berada pada jalur lintas Sumatera menjadi faktor utama yang mempengaruhi dinamika penduduk terutama di daerah perbatasan.

Dinamika kehidupan masyarakat di daerah ini terutama tampak dari tingginya mobilitas penduduk Kota Lubuklinggau sendiri dan penduduk dari luar Kota Lubuklinggau. Jalur lintas Sumatera yang selalu dilalui oleh bus antarkota antarprovinsi dan truk antarprovinsi setidaknya memberikan sumbangan perekonomian bagi penduduk sepanjang jalur lintas Sumatera. Pembangunan rumah-rumah makan dan penginapan merupakan respon masyarakat terhadap potensi yang dimiliki daerah ini.

Secara budaya tidak ada pengaruh signifikan antara masyarakat di wilayah Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan masyarakat yang berada di Kecamatan Lubuklinggau Barat terutama di Kelurahan Watas sebagai daerah administratif yang berbatasan langsung. Masyarakat kedua daerah merupakan satu suku bangsa yaitu suku bangsa Lembak (orang Dusun). Dengan kondisi ini maka konsep masyarakat pendatang tidak dipakai oleh masyarakat di kedua sisi perbatasan bagi penduduk masing-masing daerah perbatasan. Konsep pendatang hanya diberikan bagi masyarakat. Konsep pendatang

ditujukan kepada masyarakat yang bukan suku bangsa asli Kabupaten Musi Rawas (termasuk Lubuklinggau) dan Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu. Kondisi ini memunculkan adanya perasaan yang sama (*common sense*) dalam menyikapi kehidupan kemasyarakatan tanpa memandang wilayah geografis dan administratif. Namun di sisi lain sebagai daerah lintasan, Kota Lubuklinggau sangat terbuka terhadap segala aspek perubahan. Pengaruh budaya dari para pendatang maupun pelintas lambat laun diterima oleh masyarakat. Demikian juga tersedianya sarana perdagangan dan sarana hiburan lainnya menjadi faktor utama yang mempengaruhi pola perilaku masyarakat.

Ekonomi dan perdagangan merupakan aktivitas yang paling dominan dalam kehidupan masyarakat sebagai kompensasi terbatasnya lahan pertanian.

B. Saran

Sebagai sebuah daerah perlintasan, Lubuklinggau merupakan daerah potensial untuk berkembang. Namun berbagai faktor positif maupun negatif muncul seiring dengan perkembangan daerah. Interaksi yang terus menerus dengan berbagai orang luar setidaknya akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat setempat sehingga diperlukan peraturan hukum yang tegas agar tingkat penyimpangan dapat dikurangi. Di bidang budaya, perlunya peran serta kaum adat dan pengurus Dewan Adat Istiadat Kota Lubuklinggau untuk terus menerus mengawasi dan memberikan pandangan ke pemerintah kota dalam mengambil kebijakan pembangunan kota agar memperhatikan kondisi budaya daerah jangan sampai terkikis akibat dari interaksi yang tidak terbatas.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, Irwan. "Globalisasi, Gaya Hidup Kota, dan Relokasi Kebudayaan", Makalah pada Simposium Internasional Journal Antropologi ke-2, Universitas Andalas Padang 18 – 21 Juli 2001.
- Arios, Rois Leonard., dkk. 2003. *Identitas Etnis Masyarakat Perbatasan: Kasus di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman*. Padang: BKSNT Padang.
- Arsana, IGN. "Pola Hubungan Antar Suku Bangsa (Kasus Afinitas Kultural di Jembrana)", Makalah pada Widyakarya Nasional Antropologi dan Pembangunan, Hotel Indonesia 26-28 Agustus 1997, Jakarta.
- Asnan, Gusti. "Pasaman Barat dan Dilema Daerah Tapal Batas". *Padang Ekspres*, 2 Juli, 2001.
- Astuti, Renggo dan Sigit Widi. 1999. *Budaya Masyarakat Perbatasan: Hubungan Sosial Antargolongan Etnik yang Berbeda di Daerah Sumatra Barat*. Jakarta: Depdikbud.
- Bala, Poline, "Interethnic Ties Along the Kalimantan Sarawak Border in Highlands Borneo: the Kelabit and Lun Berian Case in the Kelabit – Kerayan Highlands", *Makalah* pada Simposium Internasional Journal Antropologi ke-2, Universitas Andalas Padang 18 – 21 Juli 2001.

- Barth, Frederich. 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: UI Press.
- Djurip *et.al.* 2000. *Budaya Masyarakat Suku Bangsa Minangkabau dan Lingkungannya di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat*. Jakarta: Depdiknas.
- Haba, John. "Hubungan Sosial Antara Kelompok Etnis di Entikong dan Jagoi Babang", Makalah pada Simposium Internasional Journal Antropologi ke- 2, Universitas Andalas Padang 18 – 21 Juli 2001.
- Haviland, William A. 1988. *Antropologi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Keesing, Roger M. 1989. *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Djambatan.
- L. Dyson P, "Identitas Etnis dan Perubahan Kebudayaan: Kasus Pada Orang Dayak di Kalimantan Timur", Makalah pada Widiyakarya Nasional Antropologi dan Pembangunan, Hotel Indonesia 26-28 Agustus 1997, Jakarta.
- Maryetti, *et.al.* 1999. *Integrasi Nasional Suatu Pendekatan Budaya di Daerah Sumatra Barat*. P2NB Sumatra Barat: Depdikbud.

- Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pelly, Usman. *Masalah Batas-Batas Bangsa*, Makalah pada Widiyakarya Nasional Antropologi dan Pembangunan, Hotel Indonesia 26-28 Agustus 1997, Jakarta.
- _____. 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi, Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta: LP3ES.
- Purna, I Made, “Budaya Masyarakat Perbatasan (Studi Kasus Desa Pegayaman Buleleng)”, *Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional*, BKSNT Denpasar Bali Nomor 02 tahun 2001.
- Sianturi, Eddy MT., dan Nafsiah, “Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI” (<http://buletinlitbang.dephan.go.id>)
- Siburian, Robert., *Entikong: Daerah Tanpa Krisis Ekonomi di Perbatasan Kalimantan Barat – Serawak*, Makalah pada Simposium Internasional Journal Antropologi ke – 2, Universitas Andalas Padang 18 – 21 Juli 2001
- Siddik, Abdullah. 1996. *Sejarah Bengkulu: 1500 – 1990*. Jakarta: Balai Pustaka
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Standing, Guy. 1987. *Konsep-Konsep Mobilitas di Negara Sedang Berkembang*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM

Suparlan, Parsudi. *Keyakinan Keagamaan dalam Konflik Antarsuku bangsa*, Makalah pada Simposium Internasional Journal Antropologi ke-2, Universitas Andalas Padang 18 – 21 Juli 2001

Tim Litbang Kompas. 2001. *Profil Daerah Kabupaten dan Kota Jilid 1*. Jakarta: Kompas.

Tirtosudarmo, Riwanto. *Kalimantan Barat Sebagai “Daerah Perbatasan”*: Sebuah Tinjauan Demografi-Politik, Makalah pada Simposium Internasional Journal Antropologi ke – 2, Universitas Andalas Padang 18 –21 Juli 2001.

<http://buletinlitbang.dephan.go.id>

www.depkominform.go.id

<http://www.lubuklinggau.go.id>

Evanty, Nukila. “Regulasi tentang Batas Wilayah NKRI”
(<http://www.Suarapembaruan.com/news/2004/08/13>)

“Persoalan Perbatasan RI-Timor Leste Kian Pelik”. Harian Suara Pembaruan, edisi 2 Maret 2006.

“PP 84 Timbulkan Perpecahan”, *Harian Singgalang*, edisi 27 Februari 20006.

Peter Salim dan Yenny Salim. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/23/otonomi/640773.htm>

<http://lubuklinggau.go.id/detailsly.php?recordID=9>



Rois Leonard Arios, merupakan alumni Antropologi Universitas Sumatra Utara tahun 1995. Pertama bekerja sebagai tenaga SP3K Ditjen Kebudayaan Depdikbud tahun 1996 - 1998 di Kecamatan Barus Kab. Tapanuli Tengah Sumut. 1999 diterima sebagai PNS di BKSNT Jayapura Papua dan 2001 pindah ke BKSNT Padang Sumbar (kini BPSNT Padang). Untuk diskusi melalui e-mail: roisarios@yahoo.co.id



Yondri, merupakan alumni Antropologi Universitas Andalas Padang tahun 1988. Pertama bekerja di bidang Jarahnitra Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatra Barat dari tahun 1989 - 1998. Tahun 1998 pindah ke BKSNT Padang Sumbar (kini BPSNT Padang) sebagai peneliti.

ISBN:
978-602-8742-00-9



978-602-8742-00-9



BPSNT Padang
(Anggota IKAPI Sumatera Utara)
Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuripan
Telp/Fax. 0751-496111
Website: www.bpsnt-padang.info
e-mail : surat@bpsnt-padang.info